

**DISKRESI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

(Studi Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Ringan di Polres Kota Batu)

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR KESARJANAAN  
DALAM ILMU HUKUM**



Oleh:

NOVIA RATIH PUSPITA DEWI

NIM. 0910110199

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **DISKRESI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Ringan di Polres Kota Batu)**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Novia Ratih Puspita Dewi**

**b. NIM** : **0910110199**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **6 Bulan**

**Disetujui pada tanggal** : **Mei 2013**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof. Masruchin Ruba'i S.H., M.S.**

**Paham Triyoso S.H., M. Hum.**

**NIP: 19760429 200212 2 001**

**NIP: 19540517 198203 1 003**

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eny Harjati S.H., M. Hum.**

**NIP: 19590406 198601 2 001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DISKRESI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

**(Studi Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Ringan di Polres Kota Batu)**

**Oleh:**

**Novia Ratih Puspita Dewi**

**NIM: 0910110199**

**Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: Mei 2013**

**Ketua Majelis Penguji**

**Anggota Penguji**

**Prof. Masruchin Ruba'i S.H., M.S.**

**Paham Triyoso S.H., M. Hum.**

**NIP: 19760429 200212 2 001**

**NIP: 19540517 198203 1 003**

**Anggota Penguji**

**Anggota Penguji**

**Dr. Bambang Sudjito, S.H., M. Hum.**

**Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M. Hum.**

**NIP: 19520605 198003 1 006**

**NIP: 19681102 199003 2 001**

**Anggota Penguji**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Yuliati, S.H., LL.M.**

**Eny Harjati, S.H., M. Hum.**

**NIP: 19660710 199203 2 003**

**NIP: 19590406 198601 2 001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Dr. Sihabudin, S.H., M.H.**

**NIP: 19591216 198503 1001**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan berkat dan karunia yang tiada henti hingga penulis sampai pada tahap ini, khususnya denga selesainya laporan skripsi dengan judul **“DISKRESI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Ringan di Polres Kota Batu)”** sebagai salah satu kewajiban mahasiswa hukum.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Eny Harjat, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Prof Masruchin Ruba’i S.H., M.S., Selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Paham Triyoso S.H., M. Hu., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah sabar dan bersedia dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga laporan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. AKBP Muhammad Sumartono S.H., Selaku Kapolres Kota Batui, AKP Djoko Purwanto S.H., Selaku Kasat Reskrim Polres Kota Batu, dan Aiptu Rudy Yulianyو selaku Kaur Mintu Polres Kota Batu atas bantuanya untuk mendapatkan ijin agar penulis dapat melakukan penelitian di Polres Kota Batu.

5. Ibu Aiptu Endang Iriani selaku Kanit Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Kota Batu, Briptu Radityo, Briptu Eko, Briptu Laila selaku anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Batu yang telah meluangkan waktu dan menerima penulis dengan tangan terbuka, serta memberikan keterangan-keterangan yang membantu untuk selesainya laporan kuliah kerja lapang ini.
6. Ayah, Ibu, dan adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan juga banyak perhatian.

Penulis yakin laporan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan. Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan laporan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak.

Penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, April 2013

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstarksi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Diskresi.....	10
B. Kepolisian Republik Indonesia.....	19
C. Anak.....	25
D. Penganiayaan.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan.....	38



B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis Data.....	39
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Populasi, Sampel, dan Responden.....	42
G. Teknik Analisa Data.....	43
H. Definisi Operasional.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Pertimbangan Pihak Kepolisian dalam Memberikan Diskresi Terhadap Pelaku Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak.....	68
C. Faktor Penghambat dalam Penerapan Diskresi Terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak.....	100
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Rekapitulasi Personel Polres Kota Batu Berdasarkan DSP dan RIIL.....	50
Tabel 2. Data Kejahatan Konvensional Polres Kota Batu.....	62
Tabel 3. Data Jumlah Kasus yang Ditangani UPPA.....	71
Tabel 4. Data Kasus Tindak Pidana Dengan Korban Anak.....	73
Tabel 5. Data Kasus Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak.....	75
Tabel 6. Data Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.....	89





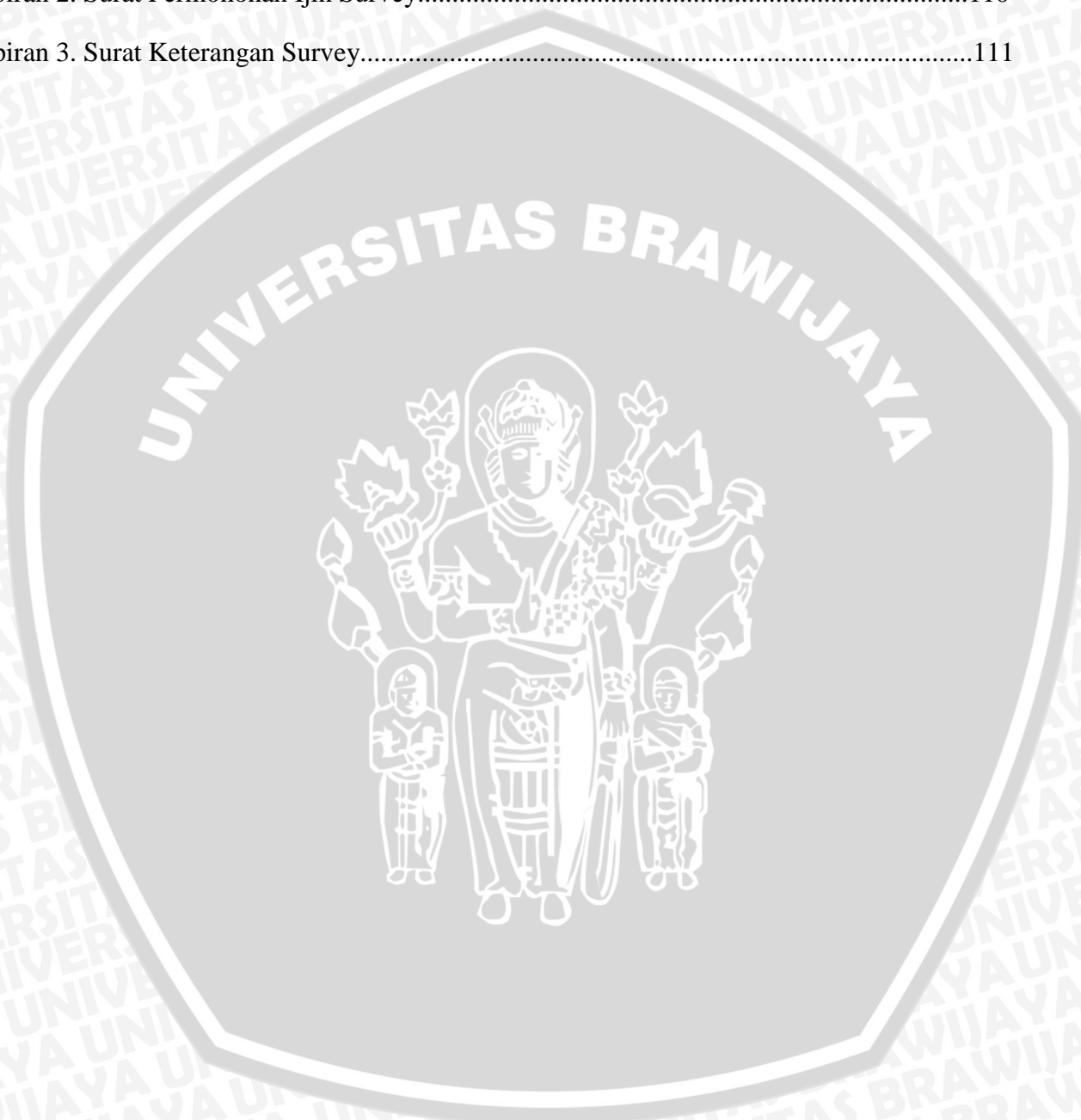
## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Polres Kota Batu .....	58
Bagan 2. Struktur Organisasi Reskrim Polres Kota Batu.....	61
Bagan 3. Struktur UPPA Polres Kota Batu.....	66
Bagan 4. Alur Fungsi UPPA.....	79
Bagan 5. Proses Pelaksanaan Diskresi.....	87



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	109
Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Survey.....	110
Lampiran 3. Surat Keterangan Survey.....	111



## ABSTRAKSI

NOVIA RATIH PUSPITA DEWI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, DISKRESI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Ringan di Polres Kota Batu) Prof. Masruchin Ruba'i SH.MS; Paham Triyoso SH.M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti dan membahas Diskresi Oleh Pihak Kepolisian dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Hal ini didasari semakin meningkatnya jumlah pelaku anak yang harus berhadapan dengan hukum positif Indonesia. Padahal Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* dimana salah satu prinsipnya adalah kepentingan terbaik bagi anak dan penghormatan atas hak dan martabat anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan pihak kepolisian Polres Kota Batu dalam menerapkan aturan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polres Kota Batu dalam menerapkan aturan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Dalam upaya mengetahui Diskresi Oleh Pihak Kepolisian dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat. Penulis dalam skripsi ini membahas permasalahan yang ada dengan cara melihat dari segi yuridis yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Polres Kota Batu penulis mendapatkan jawaban dari masalah yang ada, bahwa pihak kepolisian Polres Kota Batu dalam menjalankan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan memiliki beberapa pertimbangan, antara lain pelaku masih dibawah umur, tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan, kerugian yang dialami oleh korban tidak membahayakan nyawa, keresahan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak, persetujuan korban atas penerapan diskresi, kesediaan pelaku dan keluarga pelaku untuk menepati perjanjian dan syarat diskresi. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polres Kota Batu yakni anggapan negatif masyarakat terhadap pihak kepolisian, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat terutama pada kebijakan diskresi, penolakan pemberlakuan diskresi oleh korban dan keluarga korban. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Kota Batu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan pembangunan citra kepolisian sebagai pengayom masyarakat, melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat, bagi korban dan keluarga korban yang menolak diberlakukannya diskresi diberi pemahaman dan pengertian atas kebijakan diskresi.

Agar penerapan diskresi berjalan dengan baik maka diperlukan kepercayaan terhadap kinerja kepolisian dalam mengemban tugas penyelidikan dan penyidikan oleh pihak-pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Begitu kompleksnya hukum positif Indonesia yang berlaku pihak



kepolisian dapat bekerjasama dengan kementrian dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat luas.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum, Kepolisian erat kaitanya dengan kontrol yang dilakukan terhadap ketertiban yang ada di masyarakat, sebagai pemegang kontrol pihak kepolisian memiliki andil besar terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Undang-undang Kepolisian) pihak Kepolisian memiliki fungsi dan tujuan yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Kepolisian.

Pasal 2 Undang-undang Kepolisian, Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Undang-undang Kepolisian, Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak, masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut *zoon politicon*. Aristoteles seorang filsuf yunani berpendapat bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yakni makhluk sosial yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat.

Tidak jarang dalam masyarakat akan terjadi sebuah konflik, di mana dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak jarang antara

kebutuhan dan keinginan manusia yang satu dan manusia yang lain akan saling bertentangan. Maka akan muncul sebuah konflik baik itu antar perseorangan maupun kelompok, dapat dialami orang tua maupun anak-anak, bahkan dapat dilakukan wanita maupun pria. Kehidupan bermasyarakat antar manusia memiliki hak dan kewajiban, di mana adanya hak dan kewajiban ini untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

Konflik juga dapat dialami oleh anak, di mana anak juga memiliki kepentingan guna memenuhi keinginan maupun kebutuhannya. Tidak dapat dipungkiri anak juga dapat berkonflik dengan lingkungan sosialnya, terlebih anak masih memiliki jiwa yang labil. Tidak jarang terdapat anak yang berkonflik dengan hukum, di akibatkan perbuatan mereka yang dianggap salah atau anti sosial oleh masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum kerap di kaitkan dengan *Juvenile deliquance* atau kenakalan anak, istilah *Juvenile deliquance* muncul di forum yang ada pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-undang bagi anak yang memiliki masalah di Amerika Serikat.

*Juvenile* berarti adalah anak-anak, anak muda yang memiliki ciri atau karakteristik sifat-sifat khas masa remaja. *Deliquance* berarti berbuat suatu hal yang salah, terabaikan/diabaikan/mengabaikan, yang kemudian pada perkembangannya di perluas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan masyarakat, perusak, pengacau, dan lain-lain<sup>1</sup>. Fuad Hasan berpendapat *juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan remaja, dimana bila perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa akan dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Wagianti soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, refika aditama, Bandung ,2005, hlm. 8-9.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Aanak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 22.



*juvenile Delinquency* timbul di karenakan beberapa dorongan yang dialami oleh anak, dorongan ini dapat timbul baik secara sadar maupun tidak sadar. Dorongan ini dapat berupa motivasi anak dalam melakukan perbuatan yang pada ahirnya dikatakan sebagai *juvenile Deliquenc* atau kenakalan anak, motivasi tersebut terbagi dalam dua macam motivasi yakni intrinsik dan ekstrinsik<sup>3</sup>. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai rangsangan dari luar dirinya atau lingkungan, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan pada dirinya yang berasal dari luar diri seseorang.

Anak kerap terlibat suatu tindak pidana, salah satunya adalah penganiayaan. Penganiayaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa orang lain dalam KUHP dapat dibedakan atas 2 dasar yaitu : (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya yaitu nyawa<sup>4</sup>. Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan juga dapat diartikan sebagai sengaja merusak kesehatan seseorang<sup>5</sup>. Penganiayaan adalah sebuah bentuk serangan yang tidak berakibat kematian pada korban, penganiayaan dapat dilakukan oleh seorang anak yang merasa terganggu keadaan atau kehormatannya.

Anak sebagai pelaku sebuah tindak pidana tetap dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, di mana anak adalah manusia yang belum sempurna dan belum dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, di mana perkembangan jiwa, fisik, dan kepribadian mereka belumlah sempurna.

---

<sup>3</sup> Wagianti Soetodjo, *Opcit*, hlm.17

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 55.

<sup>5</sup> R. Soesilo, *UU Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polieta, Bogor, hlm.211.

Penyelesaian kasus anak yang melalui jalur pengadilan adalah cara yang dianggap membahayakan perkembangan jiwa anak, di mana terdapat ketakutan sebagian orang bahwa penyelesaian melalui pengadilan akan membuat anak mengalami beban mental dan sosial yang teramat berat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terdapat kesempatan untuk anak yang berhadapan dengan hukum menyelesaikan kasusnya di luar persidangan atau hukum yang berlaku.

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi', didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya dapat di lakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi sebagai salah satu jalan dalam menangani kasus anak adalah salah satu kewenangan dari pihak kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresionernya. Diskresi diharapkan dapat meminimalisir angka anak yang harus mengalami penahanan dan segala bentuk aturan dalam hukum pidana positif. Diskresi diharapkan dapat menekan jumlah anak yang harus berhadapan dengan hukum hukum positif Indonesia, dimana pihak kepolisian menggunakan tindakan yang mengedepankan keyakinan yang

ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endang (Kanit UPPA) di Polres Batu ditemukan 20 kasus tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dari kedua puluh kasus yang ada terdapat lima kasus yang di diskresi<sup>6</sup>. Salah satu kasus yang di diskresi adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh BM (16 tahun), korban yang diserang adalah teman sekolah BM. Penganiayaan ini dilatarbelakangi oleh dendam yang dimiliki oleh BM pada korban, namun pada akhirnya kasus ini dihentikan karena kebijakan diskresi yang dipilih oleh pihak kepolisian. Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian di Polres Kota Batu, dimana hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“DISKRESI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Ringan di Polres Kota Batu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan pihak Kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap pelaku kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa hambatan dalam penerapan diskresi terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak?

---

<sup>6</sup> Wawancara prasurvey dengan Aiptu Endang Iriani Kanit UPPA Polres Kota Batu, diolah, 10 Oktober 2012.



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan pihak Kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan pihak Kepolisian dalam penerapan diskresi terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya pengembangan ilmu hukum dan penerapan teori hukum di tengah-tengah masyarakat. Sebagai sarana untuk menyampaikan pentingnya penggunaan diskresi dalam penyelesaian kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan sebagai bahan informasi untuk penelitian yang lebih mendalam bagi mahasiswa lain yang ingin meneliti tentang diskresi.

#### 2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi pemerintah, yakni sebagai acuan atau pedoman untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah diskresi sehingga diskresi dapat dapat digunakan sebagai alternatif utama penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Bagi aparat penegak hukum, yakni sebagai acuan untuk melaksanakan diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak

dalam melakukan diskresi secara efektif guna mewujudkan ketertiban hukum.

- c. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan lebih memahami diskresi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur hukum yang berlaku.
- d. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, yakni dapat memberikan pengetahuan mengenai kajian hukum pidana terutama terkait diskresi.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari:

1. Bab I : Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II : Kajian pustaka, yang berisikan kajian umum mengenai Diskresi, kajian umum mengenai Kepolisian Republik Indonesia, kajian umum mengenai Anak, dan kajian umum tentang Penganiayaan.
3. Bab III : Metode Penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, alasan pemilihan lokasi, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik analisa data yang digunakan penulis, serta definisi operasional.
4. Bab IV : Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan penelitian ini yaitu diawali dengan

gambaran umum tempat penelitian yakni Polres Batu, Penerapan Diskresi terhadap tindak pidana yang ditangani oleh Polres Batu, Diskresi terhadap kasus yang dilakukan oleh anak terutama kasus penganiayaan.

5. Bab V :Berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Diskresi

##### 1. Sejarah Diskresi

TAP MPR No.VI tahun 2000 adalah awal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terpisah dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana hal ini berdampak pada kesadaran hukum organisasi Polri itu sendiri. Guna mewujudkan kepolisian yang profesional maka dibentuklah Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut Undang-undang Kepolisian). Undang-undang Kepolisian mengatur tentang penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, ketertiban dalam masyarakat dan tugas perlindungan, pengayoman serta pelayanan terhadap masyarakat.

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkan pihak kepolisian dalam salah satu fungsi penting, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka lahirlah konsep diskresi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian, diskresi sebagai suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi pihak kepolisian.

Dalam perkembangannya dikenal diversi sebagai bagian dari diskresi, dimana diversi dilatarbelakangi oleh keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

adalah konvensi internasional yang mengatur hak-hak anak di antaranya adalah hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak kultural.

*Convention on the Rights of the Child* (selanjutnya disebut Konvensi Hak Anak) merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis, bagi negara yang meratifikasi konvensi internasional ini maka terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional yang ada.

Konvensi Hak Anak kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan mempengaruhi pembuatan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana kedua Undang-undang tersebut mengutamakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Terdapat empat prinsip umum yang tertuang dalam *Convention on the Rights of the Child*, yakni:

#### 1.1.1. Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip non diskriminasi ini tertuang dalam pasal 2 Konvensi Hak-hak Anak.

#### 1.1.2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah umat manusia berkewajiban untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak-

anak. Prinsip ini tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak.

#### 1.1.3. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang

Prinsip ini memiliki makna bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip ini tertuang dalam pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak-hak Anak.

#### 1.1.4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Maksud dari prinsip ini adalah pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak.

*Article 37* perjanjian internasional Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa:

*“No child shall be deprived of her or his liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention, or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time”.*

Artikel 37 ini kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, dalam artikel Konvensi Hak Anak yang intinya menyatakan agar anak yang bermasalah dengan hukum dihormati hak dan martabatnya dan agar perlakuan terhadap anak dilakukan dengan mengingat usia anak serta reintegrasi sosial anak.

Maka untuk mewujudkan penghormatan atas hak dan martabat anak, serta untuk memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dibuatlah aturan



mengenai diversifikasi yang tertuang dalam aturan ke-11 *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. *The Beijing Rules* mengatur lebih lanjut mengenai diversifikasi, yakni dengan tujuan utama agar anak tidak terlalu banyak terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sejauh ini Indonesia telah membuat aturan diversifikasi dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru akan berlaku dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Untuk mengatasi hal tersebut maka pihak kepolisian lebih memilih untuk menggunakan aturan diskresi terhadap kasus anak dimana aturan diskresi ini telah diatur dalam Undang-undang Kepolisian.

## 2. Pengertian Diskresi

Diskresi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni "*discretion*", yang menurut Alvina Treut "*ability to choose wisely or to judge one self*". Diskresi diartikan oleh Alvina sebagai kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri<sup>7</sup>. "*Discretion*" dalam *Black Law Dictionary* mengandung arti "*A public official's power or right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience*"<sup>8</sup>. Diskresi dalam hal ini dapat disebut sebagai kekuasaan pejabat publik untuk bertindak berdasarkan keputusan dan hati nurani sendiri.

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan

<sup>7</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 180.

<sup>8</sup> Bryan A. Garne, *Black's Law Dictionary*, St. Paul MN, West Group, 1999, hlm. 479.

yang dimilikinya<sup>9</sup>. Diskresi yang di kedepankan adalah manfaat atau tujuan, di mana tujuan diskresi ini tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Konsep diskresi muncul dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) yang termuat dalam Undang-undang Kepolisian yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum. Penilaian anggota kepolisian tersebut tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi erat kaitannya dengan kewenangan pemerintah dalam kebebasan bertindak. Sesuai pasal 15 ayat (2) huruf k undang-undang Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Kewenangan yang dimiliki pihak kepolisian

---

<sup>9</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 3.

adalah salah satu bentuk kebebasan bagi aparat pemerintahan, dalam buku milik Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kebebasan pemerintah dibagi menjadi dua<sup>10</sup>:

1. Kebebasan kebijaksanaan

Kebebasan kebijaksanaan atau *beleidsvrijheid* yang dapat dimaknai sebagai diskresi dalam artian sempit, dimana bila sebuah peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintah,

2. Kebebasan penilaian

Kebebasan penilaian atau dapat disebut *beoordelingsvrijheid* yang dapat disebut sebagai wewenang diskresi dalam arti tidak sesungguhnya ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang terpenuhi.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, Hukum Kepolisian, Yogyakarta, Laksabang Presindo, 2006, hlm. 156



Anggota Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf l. Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang telah diatur dalam pasal 16 ayat (2).

Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Kepolisian, yang turut mengatur mengenai diskresi yakni dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa ; dan
- e. menghormati hak asasi manusia. Aaaaa aaaa aaaaaa a

Sesuai pasal 16 ayat (1) huruf l mengenai tindakan lain, dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dikenal wewenang untuk mengadakan tindakan lain. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, menyebutkan penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum dan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.

Hukum positif yang selama ini digunakan untuk mengadili anak, dinilai tidak memberikan solusi terbaik bagi anak dimana muncul masalah-masalah

baru bila si anak dihadapkan dengan hukum positif yang ada. Guna menghindari dampak negative dari praktek pemidanaan maka digunakanlah mediasi penal.

Mediasi penal yang juga dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *viictim offenders mediation*, *offenders victim arrangement* (Inggris), *strafbeminddeling* (Belanda), *der Au Bergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis)<sup>11</sup>. Mediation adalah salah satu program yang terdapat dalam prinsip ADR (*Alternatif Dispute Resolution*), di mana dalam praktek di Indonesia pihak kepolisian berperan sebagai mediator. Bentuk ADR sendiri tidak hanya terbatas pada mediasi, namun juga dalam bentuk negosiasi dan rekonsiliasi.

Diversi sebagai salah satu produk diskresi seperti tertuang dalam aturan 11 *The Beijing Rules* merupakan suatu upaya pengalihan penyelesaian perkara yang ada di luar proses peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari dampak pelabelan bagi anak karena proses peradilan anak. Dalam Undang-undang sistem peradilan anak pasal 1 angka 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi dapat diwujudkan melalui musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, <http://pn-kepanjen.go.id/ADR/task.htm>, disampaikan dalam seminar hasil penelitian tentang “mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”, 2011.

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.

## **B. Kepolisian Republik Indonesia**

### **1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia**

#### **2.2.2. Tugas Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian adalah segala sesuatu hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polri mempunyai salah satu tugas selaku sebagai alat penegak hukum, hal ini diatur dalam pasal 13 Undang-undang tentang kepolisian yaitu sebagai berikut:

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang Kepolisian, pada pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Kepolisian Negara RI bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;



2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai perundang-undangan.

### **2.2.3. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai fungsi sebagaimana tertuang pada pasal 2 Undang-undang Kepolisian disebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

### **2.2.4. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia**

POLRI mempunyai wewenang yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan POLRI dalam melaksanakan tugasnya. Undang-undang Tentang Kepolisian telah mengatur mengenai wewenang POLRI. Wewenang POLRI tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu;

- a. Wewenang secara umum yang diatur pada pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian.
- b. Wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang Kepolisian.
- c. Wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur dalam pasal 16 Undang-undang Kepolisian.

Menurut pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian, secara umum POLRI mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang Kepolisian adalah:



- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa perngamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah dalam organisasi kepolisian internasional

### **C. Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah tumpuan harapan generasi tua untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik, anak menentukan bagaimana sejarah bangsa ini akan terus berlangsung atau hancur dimakan zaman. Kamus umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian anak adalah manusia yang masih kecil<sup>12</sup>,

<sup>12</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Batavia; 1976, hlm. 735

menurut Romli Atmasasmita anak adalah seorang yang masih di bawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin<sup>13</sup>.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan terdapat pengertian yang berbeda tentang makna anak, yakni:

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330, anak adalah orang yang belum dewasa, dimana anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- b. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979, anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak dapat disimpulkan sebagai manusia yang masih kecil, yakni anak yang masih dalam kandungan hingga 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah menikah. Sehingga anak adalah orang yang belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum mengerti akan

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Bandung, Armico, 1983, hlm.25

perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mana perbuatan yang tidak bertentangan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, memberikan batasan baru terhadap anak yang dapat dihadapkan dalam sistem pidana positif Indonesia. Anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Usia ini dinilai telah mengetahui perihal tindakan yang baik dan buruk, di mana mereka juga dapat melihat dampak dari apa yang telah dilakukan.

## 2. Pengertian Anak Nakal

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan anak (selanjutnya disebut undang-undang Peradilan anak), dalam pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum kerap dikaitkan dengan *Juvenile deliquance* atau kenakalan anak, istilah *Juvenile deliquance* muncul di forum yang ada pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-undang bagi anak yang memiliki masalah di Amerika Serikat.

*Juvenile* berarti adalah anak-anak, anak muda yang memiliki ciri atau karakteristik sifat-sifat khas masa remaja. *Deliquance* berarti berbuat suatu hal yang salah, terabaikan/diabaikan/mengabaikan, yang kemudian pada



perkembangannya diperluas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan masyarakat, perusak, pengacau, dan lain-lain<sup>14</sup>.

Tingkah laku yang menjurus pada tindakan *Juvenile delinquance* menurut Adler dibagi dalam 16 tingkah laku, yakni<sup>15</sup>:

- 1) Mengganggu keamanan lalu lintas dan jiwa sendiri serta orang lain;
  - 2) Perilaku ugal-ugalan yang bertujuan untuk merusak ketentraman lingkungan;
  - 3) Perkelahian antar kelompok;
  - 4) Membolos sekolah kemudian melakukan tindakan yang bersifat durjana atau a-susila;
  - 5) Kriminalitas anak, berupa tindakan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan cara, menyembelih, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
  - 6) Berpesta-pora, mabuk-mabukan, melakukan seks bebas;
  - 7) Perkosaan, didorong oleh reaksi kompensatoris dari perasaan inferior;
  - 8) Kecanduan narkoba;
  - 9) Tindakan imoral seksual secara terang-terangan didepan umum;
  - 10) Homoseksualitas, erotisme anak, dan gangguan seksual lain pada anak;
  - 11) Perjudian;
  - 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin, dan pembunuhan bayi;
  - 13) Tindakan radikal dan ekstrim seperti kekerasan, penculikan, dan pembunuhan;
  - 14) Perbuatan asosial yang diakibatkan gangguan jiwa seperti psikopatik, neurotik, dan gangguan jiwa lain;
  - 15) Tindakan kejahatan diakibatkan gangguan tidur dan ledakan maningitis;
  - 16) Penyimpangan yang diakibatkan kerusakan pada karakter anak.
- Romli Atmasasmita membagi motifasi kenakalan anak dalam dua

macam bentuk motifasi, yaitu motifasi intrinsik dan motifasi ekstrinsik<sup>16</sup>:

1. Motifasi intrinsik kenakalan anak dapat disebabkan oleh:

<sup>14</sup> Wagianti soetodjo, Hukum Pidana Anak, refika aditama, Bandung ,2005, hlm. 8-9.

<sup>15</sup> Kartono, Kartini, Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, 1992, hlm. 21-23.

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *ibid*, hlm.46

a. Faktor intelegentia;

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, anak-anak *deliquent* ini pada umumnya memiliki intelegentia lebih rendah dari anak pada umumnya. Kecerdasan yang lebih rendah dan wawasan sosial yang kurang luas lebih tajam dari pada anak pada umumnya, memudahkan anak *deliquent* tertarik pada ajakan buruk untuk menjadi *deliquent* jahat.

b. Faktor usia;

Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan. Anak yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun.

c. Faktor kelamin;

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak perempuan dan anak laki-laki, namun jumlah *deliquent* laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Perbedaan jenis kelamin ini mengakibatkan timbulnya perbedaan dari segi kualitas dan kuantitas.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Faktor kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya. Anak tunggal lebih berpotensi menjadi *deliquent* hal ini disebabkan karena anak

tunggal lebih dimanjakan oleh orang tua mereka, anak pertama juga berpotensi menjadi *deliquent* seperti halnya anak tunggal.

2. Motifasi ekstrinsik kenakalan anak dapat disebabkan oleh:

a. Faktor rumah tangga;

Keluarga yang tidak normal atau *broken home* juga menjadi kemungkinan besar dalam terjadinya kenakalan anak. *Quasi broken home* juga dapat menjadi faktor *deliquent*, dimana orang tua memiliki kesibukan masing-masing dan tidak dapat memperhatikan anak-anaknya.

b. Faktor pendidikan dan sekolah;

Pembinaan dalam sekolah ikut bertanggung jawab atas tingkah laku anak didiknya. Proses pendidikan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh dalam menimbulkan kenakalan anak.

c. Faktor pergaulan anak;

Anak dapat terpengaruh menjadi *deliquent* karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, anak-anak ini menjadi *deliquent* jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

d. Faktor mass media.



Mass media dapat mempengaruhi munculnya sifat *deliquent* pada anak, dimana gambar, bacaan, dan film mempengaruhi hasrat anak-anak. Waktu luang yang diisi dengan bacaan yang buruk akan sangat berbahaya dan menggiring anak pada perilaku yang tidak baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan batas minimum anak yang dapat diajukan di hadapan persidangan pengadilan anak adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

#### **D. Penganiayaan**

##### **1. Pengertian Penganiayaan**

Penganiayaan berdasarkan Hoge Raad, adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan<sup>17</sup>. Doktrin ilmu pengetahuan ilmu hukum pidana mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain<sup>18</sup>.

Penganiayaan memiliki empat unsur dasar, dimana unsur ini selalu dimiliki oleh tindak pidana penganiayaan, yakni:

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Grafindo, 2004, hlm. 11.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Ibid*, hlm.10.

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan
  - a. Rasa sakit pada tubuh
  - b. Luka yang dialami tubuh
- 4) Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Dapat dipahami penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak<sup>19</sup>.

Penganiayaan dalam bentuk pokok diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP. Penganiayaan harus memenuhi rumusan suatu kesengajaan, yakni<sup>20</sup>:

- a) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c) Merugikan kesehatan orang lain.

Penganiayaan dapat disimpulkan sebagai kesengajaan yang dapat menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, dan merugikan kesehatan pada tubuh orang lain. Penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

## 2. Jenis Penganiayaan

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 12

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 132.

Penganiayaan dalam KUHP dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh, di mana dalam KUHP dapat dibedakan lima macam penganiayaan diantaranya<sup>21</sup>:

#### 4.1. Penganiayaan Berdasar Pasal 351 KUHP

- a. Penganiayaan Biasa, adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan dampak berupa luka berat atau matinya korban.
- b. Penganiayaan Berakibat Luka Berat, pengertian luka berat seperti yang tertuang dalam pasal 90 KUHP yakni penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang mengakibatkan bahaya maut.
- c. Penganiayaan Berakibat Matinya Korban

#### 4.2. Penganiayaan Berdasar Pasal 352 KUHP, Penganiayaan Ringan (tidak menyebabkan sakit atau halangan menjalankan jabatan)

#### 4.3. Penganiayaan Berdasar Pasal 353 KUHP

Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang memiliki unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, menurut M.V.T. diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum melakukan kejahatan.

- a. Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Luka Berat
- b. Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Matinya Korban

#### 4.4. Penganiayaan Berdasar Pasal 354 KUHP

- a. Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Luka Berat
- b. Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Matinya Korban

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.50-62.



#### 4.5. Penganiayaan Berdasar Pasal 355 KUHP

- a. Penganiayaan Berat dan Berencana yang Mengakibatkan Luka Berat
- b. Penganiayaan Berat dan Berencana yang Mengakibatkan Matinya Korban

### 3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 hingga pasal 355 KUHP, di mana terdiri dari beberapa ancaman pidana yang berbeda, yakni:

#### a. Pasal 351 KUHP

Penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama pidana penjara dua tahun delapan bulan, dan denda paling banyak tiga ratus rupiah.

#### b. Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan pidana denda tiga ratus rupiah. Penganiayaan yang dilakukan pada bawahannya maka ditambah sepertiga dari hukuman pokok.

#### c. Pasal 353 KUHP

Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun, jika penganiayaan dilakukan hingga membuat korban mati maka diancam pidana penjara selama tujuh tahun.

d. Pasal 354 KUHP

Penganiayaan yang sengaja menyebabkan luka berat terhadap orang lain dapat diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban diancam dengan pidana sepuluh tahun.

e. Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dulu diancam pidana penjara selama dua belas tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban maka diancam pidana penjara selama lima belas tahun.

#### **4. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan**

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP, dimana penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Percobaan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan ini tidak dapat dihukum. Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit (ziek) dan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya, sehingga masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.<sup>22</sup> Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apa pertimbangan pihak kepolisian dalam menggunakan metode diskresi untuk kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak serta hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian.

pendekatan yuridis yang digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan penerapan diskresi terhadap anak yang melakukan penganiayaan. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji dan membahas permasalahan dari aspek sosialnya yaitu realita penerapan asas diskresi terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

##### B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan mengenai permasalahan yang dikaji maka lokasi penelitian ini dilakukan di kepolisian Polres Batu. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah:

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 42.



- a) Kota Batu saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat baik dalam dunia perekonomian, pendidikan, maupun kehidupan sosial masyarakatnya sehingga dapat digunakan sebagai objek penelitian yang relevan.
- b) Pra Survey yang dilakukan mendapatkan data dari 20 (dua puluh) kasus yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat 4 (empat) kasus yang didiskresi.

### C. Jenis Data

#### 3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan<sup>23</sup>. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan pihak kepolisian, dimana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi bagi penulis terkait faktor yang melatar belakangi pihak kepolisian memberikan diskresi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak.

#### 3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, Undang-Undang, majalah, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas<sup>24</sup>.

Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik Satuan Reskrim Polres Batu dan penelusuran kepustakaan yang terkait dengan diskresi pada kasus anak yang melakukan penganiayaan. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data kasus yang ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Batu selama tahun 2011 s/d

<sup>23</sup> M.Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, 1999, hlm.35.

<sup>24</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.107.

2012. Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini, adalah:

a. Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak;
3. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

b. Buku-buku kepustakaan, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan diskresi.

c. Pendapat pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan diskresi.

#### **D. Sumber Data**

##### **4.1. Sumber Data Primer**

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui metode wawancara dan pengamatan langsung antara Penulis dengan penyidik Polres Batu yang menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

##### **4.2. Sumber Data Sekunder**

Penelitian Kepustakaan yaitu metode penelitian dan pengumpulan data melalui kepustakaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari data statistik dari Polres Batu, buku-buku dari PDIH yakni pusat data ilmu hukum yang terdapat dalam Fakultas Hukum, buku-buku dari perpustakaan pusat yakni perpustakaan utama yang ada di Universitas Brawijaya, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 5.1. Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, yakni berdialog dengan narasumber untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung, yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan menyusun pertanyaan secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian ini. Proses wawancara akan dicatat dan direkam agar dapat dianalisa secara teliti.

### 5.2. Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik studi dokumentasi dan teknik studi kepustakaan. Teknik studi dokumentasi yaitu studi dengan mengumpulkan, mengutip, dan menyalin dokumen-dokumen resmi yang ada di Polres Batu yang terkait dengan diskresi pada tersangka tindak pidana penganiayaan. Studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan beberapa literatur yang terkait.



## **F. Populasi, Sampel, dan Responden**

### **6.1. Populasi**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala kegiatan atau seluruh unit yang diteliti<sup>25</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penyidik Polres Batu.

### **6.2. Sampel**

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>26</sup>. Penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Penyidik Polres Batu.

### **6.3. Responden**

Responden adalah penjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

## **G. Teknik Analisa Data**

Data yang telah diperoleh dari penelusuran di lapangan dan studi kepustakaan kemudian di olah dengan teknik deskriptif analisis, yakni:

#### **a. Sifat Analisis**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat deskriptif. Peneliti memberi gambaran atas obyek yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan tindakan pihak Kepolisian.

#### **b. Pendekatan dalam Analisis**

<sup>25</sup>Roni Hanitijo, *ibid*, hlm. 44.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 122.

Pendekatan analisis dalam penelitian ini akan menggunakan dua macam teknik analisis yakni teknik analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif. Data primer dan sekunder yang telah didapat akan dibahas sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

#### **H. Definisi Operasional**

- a. Diskresi, adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki.
- b. Kepolisian, adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Anak, adalah manusia yang masih kecil, yakni anak yang masih dalam kandungan hingga usia 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah menikah.
- d. Penganiayaan Ringan, adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu adalah salah satu Kota yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu secara resmi menjadi Kota administratif pada 7 Oktober 2002. Perkembangan pesat yang terjadi pada Kota Batu juga berdampak pada aspek-aspek pendukung Kota Batu dimana Kota batu saat ini terkenal sebagai tempat wisata juga berdampak pada pembangunan dan perekonomian masyarakat. Saat ini Kota Batu menjadi salah satu Kota besar yang ada di Jawa Timur dengan aset utama sebagai Kota pariwisata, dimana Kota Batu ditunjuk sebagai sentratif pariwisata Jawa Timur.

Kota Batu terletak –Km dari Kota Malang, Kota Batu terletak dalam koordinat geografis 110 31' 14 " – 110 36' 40" Bujur Timur dan 77 36' 38" – 008 01' 57" Lintang Selatan dengan kelembaban suhu rata-rata 18<sup>0</sup> C sampai dengan 30<sup>0</sup> C pada ketinggian 500 sampai dengan 1100 M diatas permukaan laut. Kota Batu sendiri memiliki 3 kecamatan dan 5 kelurahan, berdasarkan sensus penduduk Jumlah penduduk wilayah Batu sejumlah 188.429 Jiwa dengan perincian :

- Laki – laki : 95.180 Jiwa
- Perempuan : 93.249 Jiwa

Kepadatan penduduk Kota batu saat ini baik di daerah perkotaan, pedesaan, maupun di pegunungan secara keseluruhan berdasarkan luas wilayah di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :



- a. Kecamatan Batu : 1.801 Orang/Km<sup>2</sup>
- b. Kecamatan Bumiaji : 1.612 Orang/Km<sup>2</sup>
- c. Kecamatan Junrejo : 925 Orang/Km<sup>2</sup>

#### 1.1. Potensi Wilayah Kota Batu

Kota batu terkenal dengan hawa yang dingin dan pemandangan yang indah maka Kota Batu menjadi salah satu tujuan utama para wisatawan baik internasional dan lokal. Kota Batu sendiri memiliki berbagai potensi wilayah yang patut ditonjolkan baik dari segi alam maupun budaya,yakni:

##### 1. Alam

- a. Wisata pegunungan berupa pendakian gunung Panderman, Olahraga *Aero Sport* Sunggomaruto di Gunung Banyak Songgokerto, Bumi perkemahan Sumber darmi Oro-oro ombo dan pesanggrahan dan Hutan Coban Talun.
- b. Sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana olah raga Arum jeram di aliran sungai Brantas.
- c. Wisata air berupa pemandian Songgoriti, Seleкта, pemandian air panas Cagar dan Coban Talun di Bumiaji Batu, dan Coban Rais Ds. Oro-oro Ombo Batu.
- d. Potensi dan fasilitas pendukung pariwisata berupa penginapan, Hotel, Losmen dan Villa yang tersebar diseluruh wilayah Batu serta wisata Agro Kusuma.
- e. Gua alam seperti gua Jepang Coban Rais Ds. Tlekung.

## 2. Budaya

### a. Benda Purbakala.

Terdapat situs peninggalan di sumber air panas songgoriti yang bernama Candi Songgoriti.

### b. Kesenian

Ludruk, Campursari dan Wayang Kulit di Kelurahan Temas Kec. Batu, Kuda Lumping di Ds. Oro-oro Ombo Kec. Junrejo, Reog di Desa Punten Kec. Bumiaji Batu, Kesenian hadrah, Kesenian Modern berupa Orkes Melayu dan Drama.

### c. Tradisi

Tradisi berziarah atau sembahyang bagi etnis keturunan Cina untuk para leluhurnya di pemakaman Cina Beji (Chi Bing Ahn) dan Makam Mbah Batu Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji.

Selain wisata alam Kota Batu juga memiliki beberapa potensi wisata lain antara lain *Jatim Park*, Taman Wisata Selecta, Taman Wisata Songgoriti, Paralayang Gunung Banyak, Agro Kusuma, Pemandian air panas Cangar, *Jatim Park 2* (Museum Satwa dan Batu Secret Zoo), *Eco Green Park* serta *Batu Night Spektakuler (BNS)*.

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern di wilayah Polres Batu, dan laju pariwisata yang sangat pesat tentu memicu bertambahnya jumlah tindak pidana dan meningkat pula jumlah pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana berupa pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, kejahatan dalam rumah tangga, pemerkosaan, zina, perbuatan cabul, narkoba maupun teroris.

## 2. Gambaran Umum Polres Kota Batu

Polres Kota Batu adalah salah satu institusi penegak hukum yang berada dibawah Kepolisian Republik Indonesia, Polres adalah bagian pelaksana utama kewilayahan Polda berkedudukan di bawah Kapolda. Polres berkewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya yang terdiri dari beberapa polsek yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri

Polres Kota Batu berlokasi di Jl. Hasanudin No.1 Batu, dimana Polres Kota Batu bersebelahan dengan gedung Dewan Perwakilan Daerah Kota Batu. Polres Kota Batu berdiri diatas tanah seluas 17.003 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 12.098 m<sup>2</sup> yang bersertifikat nomor 00002 tanggal 10 Maret 2005 atas nama Departemen Pertahanan RI dengan status hak pakai.

Polsek Batu sebagai cikal bakal berdirinya Polres Batu sebelumnya berada dalam struktur Organisasi Polres Malang yang berada di wilayah Kec. Kepanjen. Pada bulan Maret tahun 2003 berdasarkan telaah staf di usulkan menjadi Polres Persiapan Batu yang direncanakan siap diresmikan dalam kurun waktu sepuluh bulan sehingga pada Bulan Desember 2003 peningkatan Polres Persiapan Batu menjadi Polres Devinitif dengan status Polres type B 2 Polda Jatim dan diresmikan tanggal 21 Desember 2003, Polres Kota Batu diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, S.H.



Polres Kota Batu saat ini di pimpin oleh seorang Kapolres yakni Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Muhammad Sumartono, SH. Polres Kota Batu saat ini memiliki 3 (Tiga) Kepolisian Sektor yang menjadi tanggung jawabnya, ketiga polsek tersebut adalah:

1. Polsek Batu
2. Polsek Bumiaji
3. Polsek Junrejo

Polsek adalah unsur pelaksana utama kewilayahan Polres yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Terdapat beberapa dusun yang berada dalam pengawasan Polres Kota Batu yakni Dusun Sisir, Dusun Ngaglik, Dusun Temas, Dusun Songgokerto, Dusun Pesanggrahan, Dusun Sumberejo, Dusun Sidomulyo, Dusun Oro-oro Ombo, Dusun Bumiaji, Dusun Pandan Rejo, Dusun Giri Purno, Dusun Sumbergondo, Dusun Tulungrejo, Dusun Punten.

Jumlah riil personel Polres Batu saat ini masih sangat jauh dari memadai dimana dari kebutuhan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010. Jumlah anggota Polri dan PNS keseluruhan Polres Kota Batu saat ini hanya 414 orang dari kebutuhan sebenarnya yaitu 650 orang (sesuai Perkap no 23 tahun 2010). Rekapitulasi personel yang terdapat di Polres Kota Batu dapat dilihat dalam Tabel bedrikut ini.

Tabel 1

## Rekapitulasi Personel Polres Kota Batu

Berdasarkan DSP dan RIIL

NO	PANGKAT	DSP	RIIL	KET	
				LEBIH	KURANG
1	AKBP	1	2		-
2	KOMPOL	4	6	2	-
3	AKP	17	15	-	2
4	IP	99	16	-	83
5	BA	487	351	-	136
6	PNS GOL. III / GOL. II	42	30	-	12
JUMLAH		650	420	2	233

(Sumber : Data Sekunder Polres Kota Batu, diolah, 2012)

Sebagai sebuah institusi pemerintahan maka Polres Kota Batu memiliki sebuah struktur organisasi yang memiliki fungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang tiap bagian yang terdapat dalam Polres Kota Batu. Struktur organisasi Polres Kota Batu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Secara garis besar, struktur organisasi Polres Kota Batu di bagi kedalam 5 (lima) Unsur, yaitu:

## 1. Unsur Pimpinan:

## a. Kapolres

Adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dalam melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

b. Wakapolres

Adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

a. Bagops (Bagian Operasi)

Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.



b. Bagren (Bagian Rencana Kerja)

Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

c. Bagsumda (Bagian Administrasi)

Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

d. Siwas (Kasi Pengawas)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

e. Sipropam (Kasi Provose Paminal)

Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

f. Sikeu (Kasi Keuangan)

Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

g. Sium (Kasi Umum)

Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

a. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

b. Satintelkam (Satuan Intelijen Keamanan)

Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

c. Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

d. Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkoba)

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

e. Satbinmas (Satuan Bina Masyarakat)

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.



f. Satsabhara (Satuan Sabhara)

Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

g. Satlantas (Satuan Lalu Lintas)

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

h. Satpamobvit (Satuan Pengaman Objek Vital)

Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.

i. Satpolair (Satuan Kepolisian Perairan)

Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.

j. Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)

Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Unsur Pendukung

##### a. Sitipol (Kasi Telekomunikasi Polisi)

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

#### 5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

##### a. Polsek (Polisi Sektor)

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bagan berikut ini dapat dilihat struktur organisasi Polres Kota Batu, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010. Bagan terdiri dari 5 (lima) unsur besar yakni unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

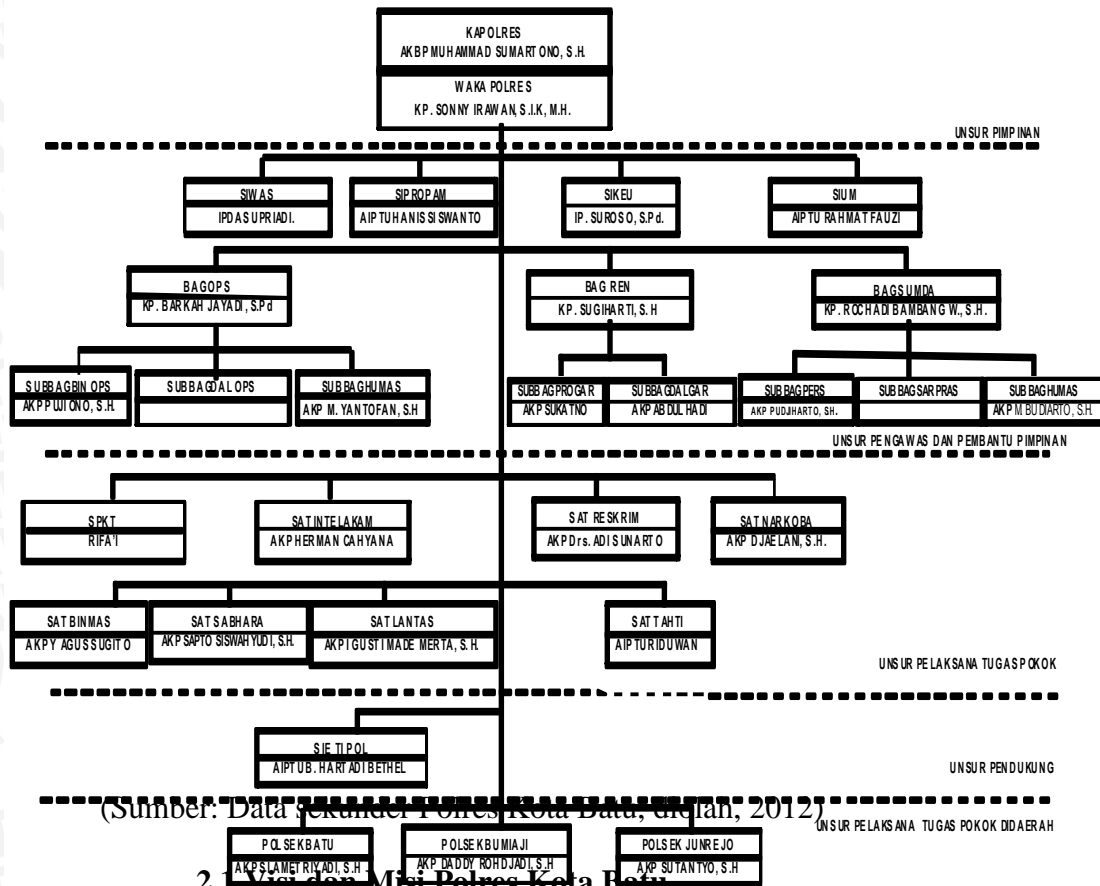
## Bagan 1

### Struktur Organisasi Polres Kota Batu

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT BATU

PERATURAN KAPOLRI  
NOMOR :23 TAHUN 2010  
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2010

#### STRUKTUR ORGANISASI POLRES BATU



## 2.1 Visi dan Misi Polres Kota Batu

### a. Visi Polres Kota Batu

Mewujudkan Keamanan dalam Negeri Melalui Kemitraan dan Memantapkan Kepercayaan Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Batu. Mewujudkan Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama- sama dengan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang professional yang selalu menjunjung tinggi supremasi



hukum dan hak asasi manusia, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat guna terwujudnya pelayanan yang optimal sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat, serta mewujudkan keamanan di wilayah Polres Batu yang kondusif.

b. Misi Polres Kota Batu

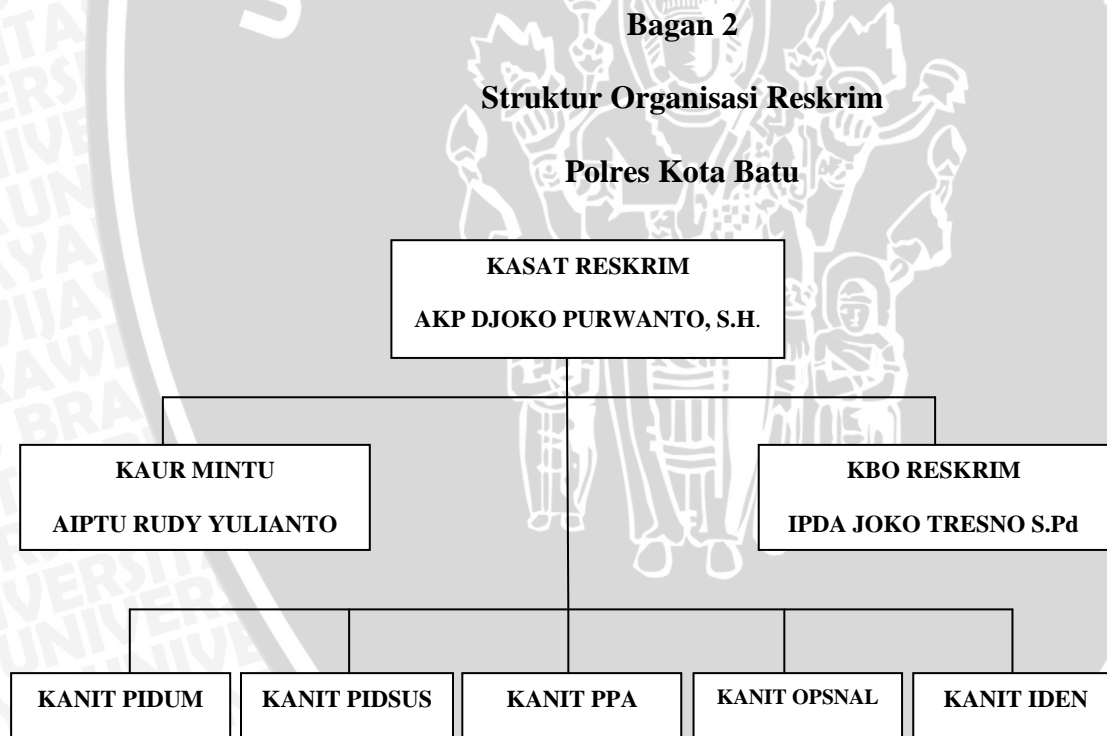
1. Melaksanakan Deteksi Dini dan Peringatan Dini Melalui Kegiatan atau Operasi Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.
2. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Secara Mudah, Resposif dan Tidak Diskriminatif.
3. Menjaga Kamtibmas Lantas Untuk Mnjamin Keselamatan dan Kelancaran Arus Orang dan Barang.
4. Menjamin Keberhasilan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Khususnya KotaBatu.
5. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat yang Berbasis Pada Masyarakat Patuh Hukum.
6. Menegakkan Hukum Secara Profesional, Obyektif, Proporsional, Transparan dan Akuntabel Untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan.
7. Mengelola Secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan Modern Seluruh Sumber Daya Polri Guna Mendukung Operasional Tugas Polri.
8. Mendukung kelancaran pengamanan Pemilukada di KotaBatu.

Satreskrim memiliki fungsi sebagai penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik

lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Satreskrim Polres Kota Batu dipimpin oleh seorang Kasat Reskrim, Satreskrim Polres Kota Batu dipimpin oleh AKP Djoko Purwanto S.H.

Satreskrim Polres Kota Batu membawahi lima unit khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyidikan dan penyelidikan yakni, Unit Pidana Umum, Unit Pidana Khusus, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Opsnal, dan Unit Identifikasi.

Sebagai sebuah unit yang memiliki tugas dan fungsi berbeda maka reskrim Polres Kota Batu memiliki struktur organisasi reskrim, yang tergambar dalam bagan di bawah ini:



(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2012)

Reskrim Polres Kota Batu bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana baik kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan berimplikasi kontijensi, maupun kejahatan terhadap kekayaan negara.

Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang paling banyak terjadi di wilayah Polres Kota Batu, dimana dalam tabel berikut ini dapat dilihat data kejahatan konvensional yang ditangani oleh reskrim Polres Kota Batu selama tahun 2011 hingga 2012:

**Tabel 2**

**Data kejahatan konvensional Polres Kota Batu**

No.	Jenis Kejahatan	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Keterangan Palsu	-	1
2	Pemalsuan Dokumen	2	1
3	Pemalsuan Uang	1	-
4	Judi	28	12
5	Penganiayaan	12	18
6	Pengeroyokan	7	13
7	Penipuan	30	39
8	Penggelapan	5	9
9	Pemerasan	5	2
10	Pengerusakan	2	1
11	Pencurian	14	9
12	Pencurian diperberat	89	56
13	Pencurian Hewan	3	-
14	Pencurian Motor	89	128
15	Pencurian Handphone	5	-
16	Penadahan	1	-
17	Melarikan Wanita	1	3
18	Perlindungan Anak	3	4
19	KDRT	1	4
20	Perkosaan	-	4
21	Perzinahan	1	1
22	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1	-
23	Perampasan	-	1
24	Hak Cipta	1	-
25	Fidusia	1	1
26	Pencemaran Nama Baik	-	2
27	Penggelapan Dalam Jabatan	-	2
28	Aborsi	-	1
29	Tempati Rumah Tanpa ijin	-	1
30	Bahan Peledak	1	1
31	Senjata Tajam	-	1
32	Pembakaran Bendera	1	-
TOTAL		303	314

(Sumber: Data Sekunder Polres Kota Batu, diolah, 2012)



Data diatas menunjukkan beberapa jenis kejahatan yang ditangani oleh Reskrim Polres Kota Batu, dimana terjadi peningkatan total kejahatan pada tahun 2011 dan 2012 yakni meningkat dari 303 (tiga ratus tiga) kasus kejahatan meningkat menjadi 314 (tiga ratus empat belas) kasus kejahatan. Pencurian kendaraan bermotor adalah jenis kejahatan yang selama dua tahun terakhir menduduki angka kejahatan tertinggi, dimana pencurian diperberat juga menjadi jenis kejahatan yang paling banyak terjadi.

Penganiayaan bukan merupakan kejahatan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Kota Batu, dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 terdapat 12 (dua belas) kasus penganiayaan yang terjadi. Tahun 2012 kasus penganiayaan yang terjadi di Polres Kota Batu meningkat menjadi 18 (delapan belas) kasus, naik 6 (enam) kasus dari tahun sebelumnya.

### **3. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak**

Unit perlindungan Perempuan dan Anak pertama kali berdiri pada tanggal 1 September 1988 tepat pada hari jadi Polwan yang ke-50, dengan nama LBPP Derap Warapsari. Lembaga ini didirikan atas inisiatif 6 (enam) orang Polwan senior yang terdiri dari Purnawirawan Polwan berpangkat Kolonel. Setelah Derap berdiri dengan bantuan ibu asuh Polwan, Kapolda Metro Jaya meresmikan 9 (sembilan) Ruang pelayanan Khusus (RPK) pada 16 April 1999. Secara organisasi Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dikendalikan oleh fungsi Reserse dan dilaksanakan oleh satuan Polisi Wanita (Polwan) sebagai kekuatan inti dari tahapan penyidikan.

Terbentuknya Unit PPA diatur secara tegas dalam Peraturan Kapolri No.Pol.10 Tahun 2007 dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  
Republik Indonesia ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002  
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)  
;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4419) ;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Perdagangan Orang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4720) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Unit perlindungan perempuan dan anak atau yang lebih dikenal dengan UPPA adalah bagian dari satreskrim yang dipimpin oleh seorang Kanit, saat ini UPPA Polres Kota Batu dipimpin oleh AIPTU Endang Iriani dalam menjalankan tugasnya UPPA memiliki 4 (Empat) orang Penyidik. Penyidik UPPA Polres Kota Batu terdiri dari satu

orang Polwan dan dua orang Polki, penyidik Polwan seharusnya lebih dominan daripada penyidik Polki hal ini berguna untuk memberi rasa nyaman pada tersangka maupun korban kejahatan yang umumnya adalah wanita dan anak-anak.

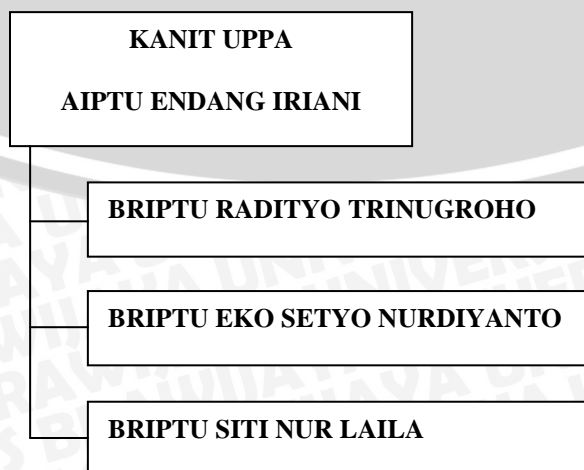
Penyidik Polwan yang memiliki sifat keibuan dan lebih sabar dalam menghadapi orang lain, diharapkan dapat membuat tersangka maupun korban merasa nyaman dan lebih terbuka mengungkapkan masalahnya sehingga dapat dengan mudah dimengerti kronologis kejadian perkara tersebut. Polwan dinilai lebih mudah diterima oleh anak-anak dan wanita yang berhadapan dengan hukum, namun tidak menutup kemungkinan Polki mengisi jabatan sebagai penyidik UPPA.

Namun sebagaimana telah diketahui Polres Kota Batu sendiri masih kekurangan personil untuk mengisi jabatan yang ada dalam struktur organisasi Polres Kota Batu sehingga untuk memenuhi penyidik polwan lebih dominan masih sangat sulit terealisasi. Hambatan ini tidak menghambat usaha UPPA Polres Kota Batu untuk melayani anak-anak dan wanita yang berhadapan dengan hukum dengan baik.

Bagan dibawah ini memperlihatkan struktur organisasi dari Unit PPA, yang didalamnya terdiri dari Kanit PPA dan Penyidik khusus PPA:

### **Bagan 3**

#### **Struktur Unit PPA Polres Kota Batu**





(Sumber: Data sekunder, diolah, 2012)

Kanit UPPA Polres Kota Batu saat ini dipimpin oleh seorang Polwan yakni Aiptu Endang Iriani, beliau selain menjadi kanit UPPA juga turun langsung dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Anggota UPPA saat ini terdiri dari tiga orang Polwan dan Polki, dimana menurut Aiptu Endang Iriani jumlah anggota saat ini sangat kurang<sup>27</sup>. Keterbatasan jumlah penyidik ini membuat UPPA banyak mengalami kendala dalam menyelesaikan kasus yang ada.

### 3.1. Fungsi dan Tugas UPPA

#### a. Fungsi UPPA

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk untuk menyelenggarakan tiga fungsi dasar yakni:

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

UPPA menjalankan fungsi khusus kepolisian, dimana unit ini sebagai penyelenggara pelayanan dan perlindungan hukum terhadap wanita atau anak yang berhadapan dengan hukum. Penyidik Unit PPA telah dibekali kemampuan khusus untuk menghadapi wanita dan anak, sebagai tujuan menciptakan rasa nyaman dan bersahabat bagi wanita atau anak yang berhadapan dengan proses hukum.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Aiptu Endang Irianai Kanit UPPA Polres Kota Batu, diolah, 20 November 2012

b. Tugas UPPA

Lingkup tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu :

- a) Perdagangan orang (*human trafficking*) ;
- b) Penyelundupan manusia (*people smuggling*) ;
- c) Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga) ;
- d) Susila (perkosaan, pelecehan, cabul) ;
- e) Perjudian dan prostitusi (*vice*) ;Adopsi ilegal ;
- f) Pornografi dan pornoaksi;
- g) Pencucian uang (*Money laundering*) dari hasil kejahatan tersebut di atas ;
- h) Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka) ;
- i) Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

UPPA dalam menjalankan tugasnya dibekali dengan kemampuan tersendiri dalam menghadapi anak-anak dan wanita yang memiliki masalah kompleks tersendiri. Lingkup tugas UPPA yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan tindak pidana lainnya membutuhkan banyak perhatian, dimana anak dan wanita adalah tantangan yang berbeda dalam sebuah kasus tindak pidana.

Salah satu lingkup tugas yang harus ditangani oleh UPPA adalah kekerasan baik secara umum maupun rumah tangga. Anak-anak dan wanita kerap menjadi korban kekerasan, dimana tidak menutup kemungkinan anak-anak dan wanita menjadi pelaku dari sebuah tindak pidana kekerasan. Sehingga peran dari UPPA ini begitu dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum bagi anak-anak dan wanita.

## **B. Pertimbangan Pihak Kepolisian dalam Memberikan Diskresi Terhadap Pelaku Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak**

Manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kekurangan maupun kelebihan telah dikarunia amanah dan tanggung jawab yang begitu besar oleh Allah *Ta'ala* manusia diberi nikmat untuk menjadi orang tua yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anak yang telah menjadi titipan mereka. Anak-anak harus didik dengan penuh kasih sayang untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan adab dan kebudayaan masyarakat yang ada, sehingga anak menjadi pribadi unggul yang dapat dibanggakan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Tidak jarang pendidikan dan kasih sayang telah dilimpahkan oleh orang tua kepada anak namun terdapat anak-anak yang melakukan sebuah tindak pidana. Anak mudah melakukan hal-hal yang dianggap amoral oleh masyarakat, hal ini dapat berasal dari pergaulan di luar rumah maupun di lingkungan sekolahnya, sehingga anak melakukan perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar dapat memimpin bangsa ini telah dilindungi oleh Undang-undang yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Undang-undang yang diperuntukan bagi kesejahteraan anak ini selalu mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak, namun dalam pelaksanaannya banyak anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapat perhatian yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang telah ada.

Anak yang melakukan tindak pidana ini dahulu masih dianggap aib yang tidak perlu didukung masa depannya, namun seiring berjalanya waktu pemerintah mulai



memperhatikan kondisi anak-anak tersebut. Pemerintah mulai memberlakukan diskresi terhadap kasus yang dinilai dapat diterapkan diskresi terutama pada kasus anak-anak yang melakukan sebuah tindak pidana.

Diskresi diharapkan dapat membatasi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjalani proses pidana formal, dimana proses yang ada saat ini dapat menimbulkan trauma pada anak. Anak kerap menerima perlakuan tidak menyenangkan saat berjalanya proses pemeriksaan atas tindak pidana yang mereka lakukan, diskresi hadir sebagai salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari pola penanganan yang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Peraturan yang tertuang dalam TR adalah salah satu metoda yang dapat digunakan oleh pihak kepolisian dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, namun TR tersebut masih sulit untuk dapat diterapkan. Pihak kepolisian masih lebih memilih untuk menggunakan aturan diskresi yang telah diatur dalam Undang-undang Kepolisian dalam menangani kasus anak.

Kepolisian adalah aparat penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian memiliki unit khusus untuk menangani anak-anak. UPPA yang merupakan salah satu unit khusus yang berada dalam struktur organisasi Reskrim dimana UPPA memiliki fungsi dan tugas tersendiri, dimana kasus kejahatan yang ditangani oleh UPPA berkisar pada wanita dan anak-anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPPA Polres Kota Batu, di bawah ini dicantumkan data kasus yang masuk dan ditangani di Polres Kota Batu. Tabel berikut menunjukkan jumlah kasus yang ditangani oleh UPPA Polres Kota Batu.

**Tabel 3**  
**Data Jumlah Kasus Yang Ditangani UPPA**

No.	Jenis Kejahatan	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012 (berjalan)
1	KDRT Fisik	5	8	-	2
2	KDRT Psikis	-	-	-	-
3	Pengeroyokan	-	-	-	1
4	Penganiayaan	3	5	1	3
5	Pengguguran	-	-	-	1
6	Persetubuhan Anak	4	5	2	8
7	Pencurian	2	1	-	1
8	Pencurian Diperberat	-	1	-	2
9	Pencurian Keluarga	2	-	1	-
10	Membawa Lari Wanita	1	2	-	1
11	Perzinahan	1	3	-	1
12	Perkosaan	1	2	-	1
13	Senjata Tajam	-	-	-	-
14	Merusak Kesopanan	-	-	-	-
15	Perdagangan Orang	1	1	1	1
16	Percobaan Perkosaan	-	-	-	-
17	Pemerasan	-	-	-	-
TOTAL		20	28	5	22

(Sumber: Data Sekunder Polres Kota Batu, diolah, 2012)

Data diatas memperlihatkan bahwa angka kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Batu tidak selalu sama, namun kerap mengalami kenaikan juga penurunan yang drastis. Total kejahatan yang terjadi pada tahun 2009 berjumlah 20 (dua puluh) kasus, dimana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindak pidana yang paling banyak terjadi. Berbeda dengan total kejahatan yang terjadi pada tahun 2010 jumlah kejahatan yang terjadi mengalami peningkatan drastis dengan

angka 28 (dua puluh delapan) tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Batu.

Tahun 2011 tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Batu mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana hanya terjadi 5 (lima) tindak pidana yang ditangani oleh UPPA. Total kejahatan yang terjadi pada tahun 2012 ini mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni terjadi 22 (dua puluh dua) kasus kejahatan.

Kasus penganiayaan berdasarkan data yang diperoleh dari UPPA Polres Kota Batu dari tahun 2009 hingga tahun 2012 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2009 jumlah kasus penganiayaan yang dilaporkan pada Polres Kota Batu adalah 3 (tiga) kasus, sementara pada tahun 2010 mengalami kenaikan hingga 5 (lima) kasus. Berbeda pada tahun 2011 kasus penganiayaan yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Kota Batu menurun yakni tercatat 1 (satu) kasus, sedangkan pada tahun 2012 yang terakhir direkap pada 20 Desember tercatat 3 (tiga) kasus.



Anak kerap menjadi korban dari sebuah tindak pidana dimana hal ini dipengaruhi oleh kondisi anak, yang berbeda dengan orang dewasa. Tabel dibawah ini menunjukkan beberapa jenis kejahatan dengan korban anak-anak, yakni:

**Tabel 4**  
**Data Kasus Tindak Pidana Dengan Korban Anak**

No.	Jenis Kejahatan	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012 (berjalan)
1	KDRT Fisik	1	-	-	-
2	KDRT Psikis	-	-	-	-
3	Pengeroyokan	-	-	-	1
4	Penganiayaan	3	4	1	3
5	Pengguguran	-	-	-	1
6	Persetubuhan Anak	4	5	2	8
7	Pencurian	-	-	-	-
8	Pencurian Diperberat	-	-	-	-
9	Pencurian Keluarga	-	-	-	-
10	Membawa Lari Wanita	1	2	-	1
11	Perzinahan	-	-	-	-
12	Perkosaan	-	-	-	-
13	Senjata Tajam	-	-	-	-
14	Merusak Kesopanan	-	-	-	-
15	Perdagangan Orang	-	1	-	1
16	Percobaan Perkosaan	-	-	-	-
17	Pemerasan	-	-	-	-
TOTAL		9	12	3	14

(Sumber: Data Sekunder Polres Kota Batu, diolah, 2012)

Menurut data yang diambil di Polres Kota Batu, pada tahun 2009 anak yang menjadi korban kejahatan terdapat pada 9 (sembilan) kasus dimana angka paling tinggi adalah anak yang menjadi korban persetubuhan. Pada tahun 2010 anak yang menjadi korban kejahatan meningkat menjadi 12 (dua belas) kasus, dimana angka tertinggi dicatat oleh tindak pidana persetubuhan anak. Tahun 2011 tindak pidana dengan korbana anak menurun hingga 3 (tiga) kasus, dimana persetubuhan pada anak tetap mencatat angka

tertinggi. Berbeda dengan tahun 2012 tindak pidana dengan korban anak naik hingga 14 (empat belas) kasus dengan angka kejahatan persetubuhan anak menempati angka tertinggi.

Penganiayaan adalah salah satu tindak pidana yang kerap menimpa anak, penganiayaan dapat dilakukan oleh orang tua maupun orang lain yang ada disekitar anak. Dalam tabel diatas dapat dilihat penganiayaan adalah kejahatan yang kerap menimpa anak setelah persetubuhan anak. Pada tahun 2009 terdapat 3 (tiga) kasus penganiayaan yang menimpa anak, sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 4 (empat) kasus dengan korban anak. Berbeda dengan tahun sebelumnya pada tahun 2011 kasus penganiayaan yang menimpa anak tercatat hanya 1(satu) kasus, sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3 (tiga) kasus.

Anak tidak hanya menjadi korban dari sebuah kejahatan, tapi juga tidak menutup kemungkinan anak menjadi pelaku dari sebuah kejahatan. Anak dapat melakukan perbuatan yang menurut masyarakat yang ada adalah sebuah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh anak. Anak yang melakukan sebuah tindak pidana tidak hanya terbatas dalam sebuah tindak pidana tapi terdapat beberapa tindak pidana yang kerap dilakukan oleh anak-anak, dalam tabel berikut terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak:

**Tabel 5**

**Data Kasus Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak**

No.	Jenis Kejahatan	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012 (berjalan)
1	KDRT Fisik	1	-	-	-
2	KDRT Psikis	-	-	-	-
3	Pengeroyokan	-	-	-	1
4	Penganiayaan	3	4	1	2
5	Pengguguran	-	-	-	1

6	Persetubuhan Anak	2	1	-	-
7	Pencurian	-	-	-	1
8	Pencurian Diperberat	-	-	-	-
9	Pencurian Keluarga	1	-	-	-
10	Membawa Lari Wanita	1	2	-	1
11	Perzinahan	-	-	-	-
12	Perkosaan	-	-	-	-
13	Senjata Tajam	-	-	-	-
14	Merusak Kesopanan	-	-	-	-
15	Perdagangan Orang	-	-	-	-
16	Percobaan Perkosaan	-	-	-	-
17	Pemerasan	-	-	-	-
TOTAL		8	7	1	6

(Sumber: Data Sekunder Polres Kota Batu, diolah, 2012)

Data diatas menunjukkan bahwa anak juga dapat melakukan sebuah tindak pidana, pada tahun 2009 terdapat 5 (lima) jenis kasus yang dilakukan oleh anak dimana total terdapat 8 (delapan) kasus yang pelakunya adalah anak. Tahun 2010 terdapat 7 (tujuh) kasus yang dilakukan oleh anak dimana menurun dari pada total kejahatan yang dilakukan oleh anak pada tahun 2009. Tahun 2011 hanya terdapat 1 (satu) kasus yang dilakukan oleh anak, namun pada tahun 2012 total kejahatan yang dilakukan oleh anak meningkat hingga 6 (enam) kasus.

Tingkah laku yang menjurus pada tindakan *Juvenile deliquance* menurut Adler dibagi dalam 14 (empat belas) tingkah laku, dimana tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak adalah sebuah tindakan kriminalitas anak. Kriminalitas anak menurut Adler dibagi dalam 14 (empat belas) hal yakni:

1. Mengancam;
2. Intimidasi;
3. Memeras;
4. Mencuri;
5. Mencopet;
6. Merampas;
7. Menjambret;
8. Menyerang;
9. Merampok;
10. Mengganggu;
11. Menggarong;



12. Melakukan pembunuhan dengan cara, menyembelih, mencekik, meracun;
13. Tindak kekerasan; dan
14. Pelanggaran lainnya.

Penganiayaan adalah tindak kekerasan yang dilakukan anak pada orang lain, dimana dengan adanya kekerasan ini diharapkan muncul rasa takut korban pada pelaku penganiayaan. Pelaku penganiayaan ini dapat dikategorikan sebagai *Juvenile delinquance*, anak nakal kerap melakukan apa yang sangat ingin dilakukan oleh dirinya tanpa memperhatikan lebih jauh akan akibat yang timbul<sup>28</sup>.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan merasa dirinya hebat ketika korban mengalami luka-luka dan tidak berani melawan. Pelaku akan merasa puas dan bangga dengan perbuatan yang mereka lakukan, kepuasan ini terkadang membawa pelaku berbuat lebih jauh terhadap korban yang tidak melawan perbuatan pelaku<sup>29</sup>. Perbuatan yang terkadang menyertai tindak pidana penganiayaan ini dapat berupa penusukan, perampasan, dan perbuatan tidak menyenangkan.

Terkadang aksi penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka disertai dengan hinaan, hal ini bertujuan untuk menjatuhkan mental korban. Hinaan yang dilakukan pelaku selalu menyertai tindak pidana penganiayaan, menurut pihak kepolisian hal ini kerap terjadi karena situasi yang mendukung dan emosi pelaku yang tinggi.

Pelaku penganiayaan semakin merasa puas ketika hinaan ini membuat korban semakin tidak berani melawan perbuatan pelaku. Penganiayaan yang kerap terjadi di wilayah hukum Polres Kota Batu tidak selalu hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang pelaku penganiayaan terdiri dari satu hingga empat orang<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Briptu Eko Setyo, Anggota UPPA Polres Kota Batu, 25 November 2012

<sup>29</sup> Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani, Kanit UPPA Polres Kota Batu, 20 November 2012

<sup>30</sup> Wawancara dengan Briptu Eko Setyo, Anggota UPPA Polres Kota Batu, 21 November 2012

## **1. Pelaksanaan Diskresi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di UPPA Polres Kota Batu**

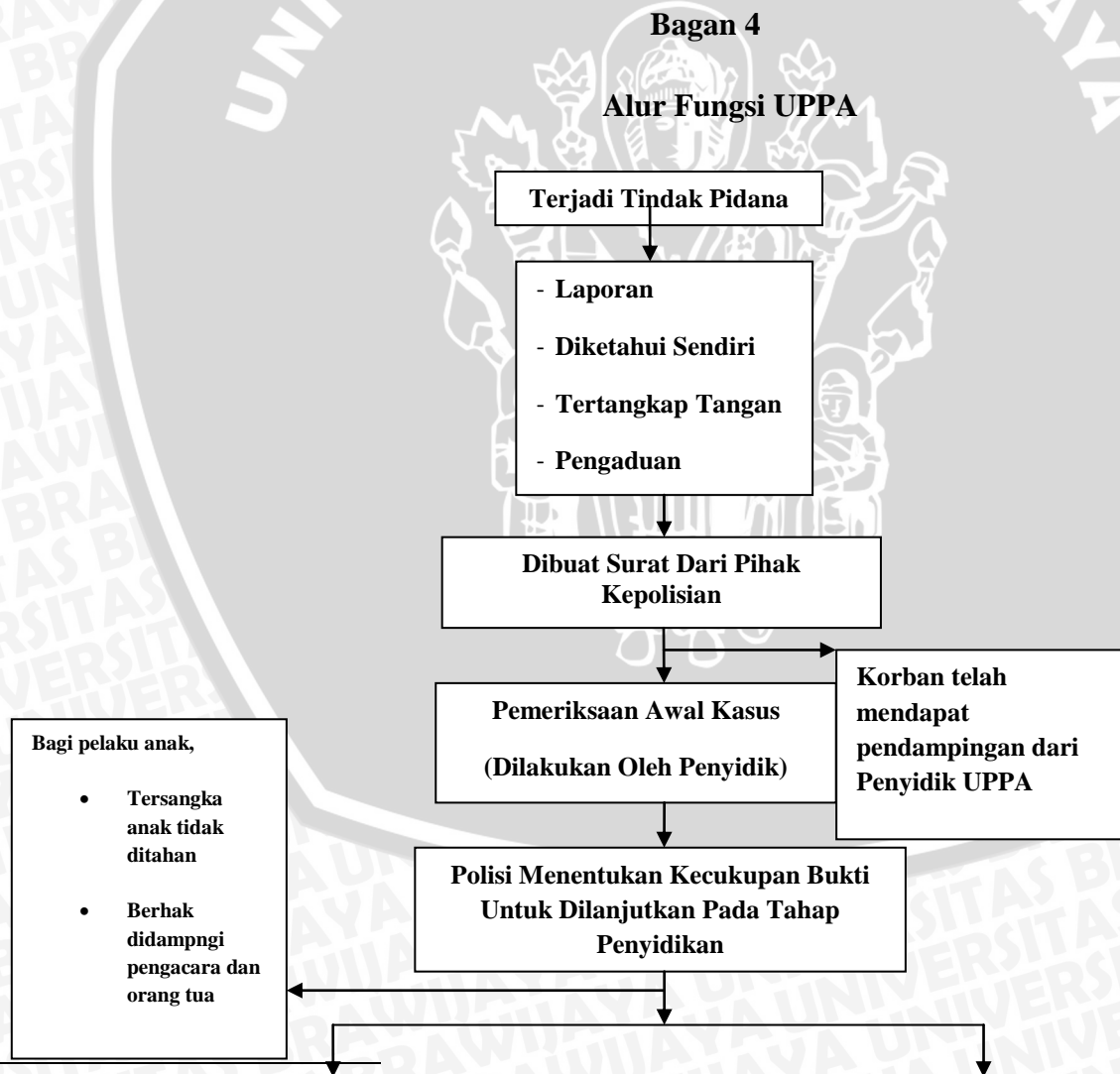
Anak adalah pribadi yang masih berkembang dan sangat berbeda dengan orang dewasa, oleh karena itu dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibutuhkan penyidik khusus anak. Penyidik anak adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Penyidik anak disyaratkan adalah penyidik Polri yang sudah memiliki pengalaman serta memiliki perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Kualifikasi penyidik anak diatur dalam pasal 41 Undang-undang pengadilan anak, dimana dalam pasal 41 ayat (1) penyidik anak ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat bagi penyidik anak diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang pengadilan anak, sedangkan bila tidak ada atau belum ada penyidik anak dapat digunakan alternatif dalam pasal 41 ayat (3) Undang-undang pengadilan anak.

Dalam menjalankan proses diskresi yang tidak dapat digunakan secara sembarangan wewenang tersebut oleh pihak kepolisian, dimana diskresi harus digunakan dengan alasan yang rasional dan logis, namun tetap selektif dan proposional. Berkaitan dengan hal tersebut UPPA Polres Kota Batu sangat hati-hati dalam melakukan penerapan wewenang diskresi, dimana penyidik harus terus selektif dan dapat

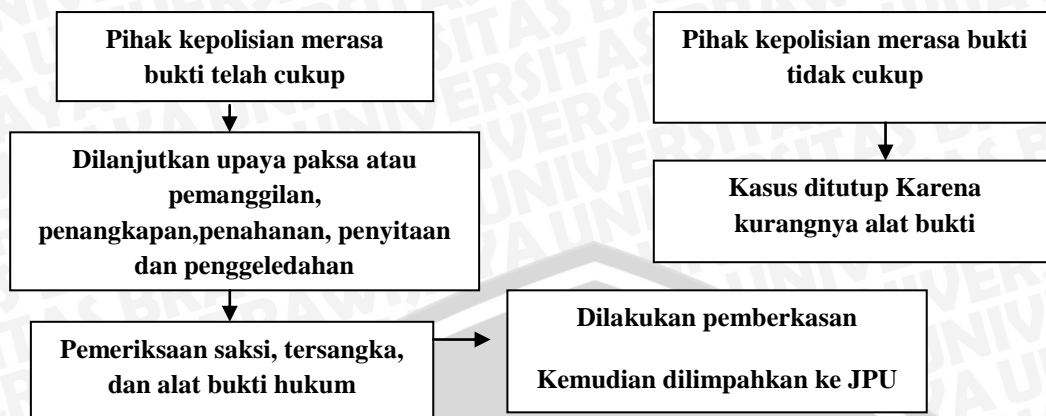
mempertanggungjawabkan keputusannya<sup>31</sup>. Maka penyidik UPPA harus memiliki daya analisis yang tajam untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan, peka terhadap lingkungan sosial sehingga dapat melihat kondisi sosial sekitar.

Pelayanan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPPA memiliki karakteristik tersendiri, dimana dalam personil penyidik yang terdapat dalam UPPA adalah anggota-anggota yang memiliki ketrampilan khusus untuk menghadapi kondisi perempuan dan anak-anak. Bagan berikut menunjukkan alur pelayanan dan perlindungan Hukum yang dilakukan oleh UPPA:



<sup>31</sup> Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani, Kanit UPPA Polres Kota Batu, 7 Desember 2012





(Sumber: Data Sekunder Polrers Kota Batu, diolah, 2012)

Bagan diatas menunjukkan alur kinerja UPPA Polres Kota Batu, dalam alur pelayanan dan perlindungan UPPA tersebut dapat kita ketahui bahwa pihak kepolisian memiliki prosedur yang sistematis. Dalam penanganan kasus anak-anak dan wanita pihak kepolisian memiliki perlindungan tersendiri bagi pelaku maupun korban anak-anak maupun wanita. Bagi pelaku anak terdapat perlindungan khusus yang telah diatur oleh Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang dijalankan oleh pihak UPPA dalam proses pelayanan dan perlindungan hukum.

UPPA Polres Kota Batu kerap mendapat laporan atas tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Batu, setelah mendapat laporan UPPA Polres Kota Batu melakukan pemeriksaan awal kasus penganiayaan yang terjadi. Pemeriksaan awal kasus dilakukan oleh penyidik UPPA, setelah dilakukan pemeriksaan awal maka pihak kepolisian menentukan kecukupan bukti untuk dilanjutkan pada tahap Penyidikan.

UPPA Polres Kota Batu bila merasa bukti yang didapat telah cukup akan melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap pelaku penganiayaan tersebut. Setelah ditangkap pelaku dan dimintai keterangan oleh penyidik UPPA Polres Kota Batu, penyidikan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan saksi dan alat bukti hukum yang ada.

Tahap pemberkasan dilakukan setelah keterangan tersangka dan saksi dirasa telah cukup, kemudian kasus akan dilimpahkan pada Jaksa Penuntut Umum.

Salah satu tugas UPPA adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan baik dalam lingkup umum maupun dalam lingkup rumah tangga. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh UPPA dapat dijalankan bila tersangka atau korban adalah anak-anak dan wanita. Kekerasan adalah sebuah tindakan ilegal dimata hukum Indonesia, bentuk kekerasan adalah sebuah serangan verbal yang dapat berakibat pada tubuh korban dari luka hingga kematian.

Serangan terhadap orang lain dengan cara memukul dipandang sebagai sebuah tindakan individu walaupun pada kenyataannya tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan lain yang terjadi sebelumnya<sup>32</sup>. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah serangan berupa penganiayaan dilakukan pada orang-orang terdekat, dimana terdapat interaksi yang tinggi antara pelaku dan korban. Interaksi yang tinggi dengan tindakan-tindakan emosional mampu memicu pada tindak kekerasan yang berakibat pada penganiayaan.

Tindakan penganiayaan yang diatur dalam KUHP dapat dibagi menjadi 4 (empat) yakni, penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang berakibat kematian. Sebuah tindak pidana penganiayaan yang terjadi sangat bergantung pada faktor-faktor yang ada pada saat kejadian tersebut, seperti kekuatan pelaku, kekuatan korban, dan tersedianya senjata<sup>33</sup>. Kondisi pelaku sangat mempengaruhi akibat dari penganiayaan yang dilakukan. Faktor psikologi pelaku juga mempengaruhi dampak serangan tersebut dimana menurut pihak UPPA Polres Kota Batu

<sup>32</sup> Thomas Santoso (Ed), Teori-teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 24.

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 27.

pelaku terutama anak-anak sering melakukan penganiayaan tanpa memikirkan lebih jauh dan dampaknya<sup>34</sup>.

Tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana umum yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap tubuh manusia, penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan pada korban dimana hal ini tidak mengganggu pekerjaannya. UPPA memiliki tugas untuk mengawasi masalah perlindungan anak, baik anak yang menjadi korban dari sebuah kejahatan maupun anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Perlindungan terhadap anak yang melakukan sebuah tindak pidana juga dijalankan oleh UPPA, salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya pemberlakuan diskresi.

Pihak UPPA dalam menjalankan diskresi bagi pelaku anak juga menggunakan TR KABARESKRIM POLRI NO.POL. TR/1124/XI/2006 tentang diversi, dimana dalam TR tersebut terdapat kriteria perkara yang melibatkan anak yang dapat di diskresi. Diversi saat ini masih dijalankan berdasar pada TR KABARESKRIM POLRI NO.POL. TR/1124/XI/2006, namun pada tahun 2012 dikeluarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Undang-undang ini mengatur lebih dalam mengenai diversi. Diversi adalah salah satu metoda yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan proses formal sistem peradilan pidana di Indonesia.

TR KABARESKRIM POLRI NO.POL. TR/1124/XI/2006 adalah pedoman yang digunakan oleh UPPA dalam menjalankan diskresi pada kasus anak. Dengan TR KABARESKRIM POLRI NO.POL. TR/1124/XI/2006 diskresi dilakukan dengan menggunakan beberapa aturan diversi yang tertuang dalam butir DDD.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani, Kanit UPPA Polres Kota Batu, 7 Desember 2012



Butir DDD ayat dua menjelaskan diversi sebagai alternatif penyelesain pengalihan dari pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dapat dinilai terbaik bagi anak. Bahwa dalam menjalankan prinsip diversi pihak kepolisian dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Dikembalikan pada orang tua anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal maupun formal;
2. Mediasi;
3. Musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban;
4. Bentuk penyelesain terbaik lain sesuai dengan kebudayaan setempat.

Terdapat kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai seorang pelaku dimana harus diupayakan penyelesaian dengan pemberlakuan diversi, beberapa kriteria tersebut tertuang dalam butir EEE yakni:

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi;
2. Memperhatikan usia dari pelaku;
3. Hasil Penelitian dari BAPAS;
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak;
5. Keresahan masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan anak;
6. Dukungan lingkungan dan keluarga;
7. Persetujuan korban dan keluarga korban;
8. Kesiadaan pelaku dan keluarga pelaku;
9. Bila anak melakukan dengan bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai prosedur biasa.

Proses diskresi mulai dijalankan sedini mungkin oleh penyidik untuk kepentingan terbaik bagi anak<sup>35</sup>. Berbeda dengan peraturan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memiliki kurun waktu tertentu untuk menjalankan diversi.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan tentang diversi, bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam kurun waktu paling lama 7 (Tujuh) hari setelah penyidikan di mulai. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses diversi agar anak tidak terbebani dalam proses penyidikan. Proses diversi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi, dengan menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Penyidik UPPA melihat anak yang melakukan penganiayaan kerap merasa bersalah ketika telah ditangkap oleh pihak kepolisian<sup>36</sup>. Pelaku penganiayaan sering merasa menyesal bila kasus penganiayaan tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian. Pelaku penganiayaan tidak menyangka bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut akan diproses oleh pihak kepolisian yang membuat pelaku harus mengikuti proses pemeriksaan di kepolisian. Kasus penganiayaan yang ditangani oleh UPPA umumnya dilakukan oleh anak-anak, penganiayaan ini dilatarbelakangi dendam atau saling ejek ketika bertemu<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Briptu Eko Setyo, Anggota UPPA Polres Kota Batu, 25 November 2012

<sup>36</sup> Wawancara dengan Briptu Radityo Trinugroho, anggota UPPA Polres Kota Batu, 20 November 2012

<sup>37</sup> Wawancara dengan Briptu Eko Setyo, Anggota UPPA Polres Kota Batu, 25 November 2012

Penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak ini kerap menimbulkan luka pada korban baik serius maupun tidak, pihak kepolisian Polres Kota Batu memiliki tiga kategori kekerasan fisik yakni<sup>38</sup>:

- a. Kategori A, Korban yang mengalami penganiayaan atau tindakan kekerasan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b. Kategori B, korban yang mengalami tindak pidana penganiayaan atau tindakan kekerasan hingga mengalami luka parah.
- c. Kategori C, korban yang mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan mendapat luka-luka ringan.

Pengelompokan dampak yang ditimbulkan dari sebuah kasus penganiayaan ini bertujuan untuk memudahkan pihak kepolisian dalam memeriksa tindak pidana, sehingga penerapan pasal yang dikenakan terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya. Diskresi dapat diterapkan pada tindak pidana penganiayaan bila kategori luka yang dialami oleh korban adalah kategori C, dimana dampak dari penganiayaan adalah luka ringan yang tidak membahayakan jiwa korban. Namun pihak kepolisian tetap memiliki pertimbangan lain dalam menetapkan ketentuan kategori untuk menjalankan proses diskresi<sup>39</sup>.

Tindak pidana penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP, memberikan batasan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan dalam menjalankan

<sup>38</sup> Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani, Kanit UPPA Polres Kota Batu, 15 November 2012

<sup>39</sup> Wawancara dengan Briptu Radityo Trinugroho, anggota UPPA Polres Kota Batu, 20 November 2012



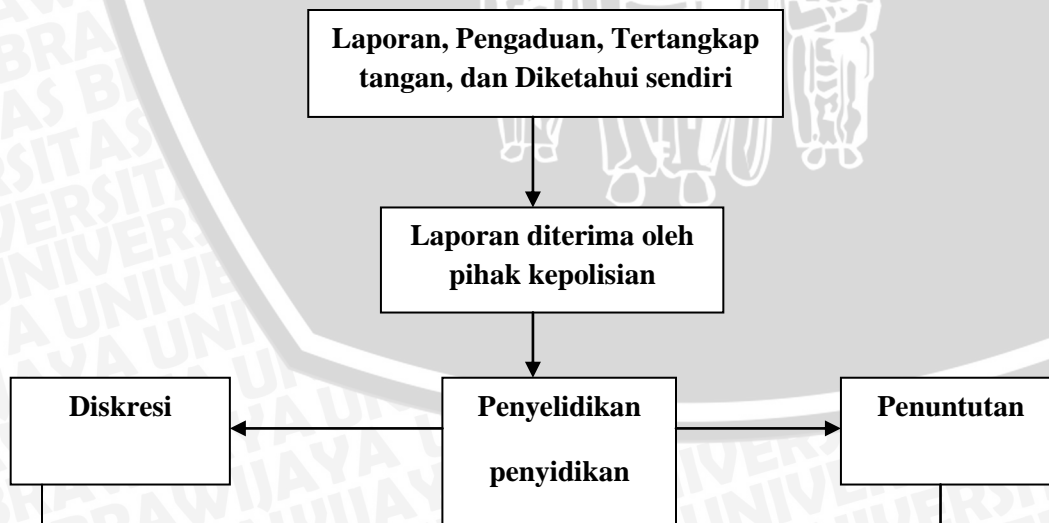
jabatan. Tindak pidana penganiayaan ringan dalam lingkup hukum Polres Kota Batu kerap dilakukan oleh anak-anak, penganiayaan dilakukan antar teman bermain dengan menggunakan tangan kosong<sup>40</sup>.

Penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak kerap membuat korban mengalami memar, lecet, pusing, dan trauma sehingga keluarga korban melaporkan tindakan pelaku pada pihak kepolisian setempat. Untuk melindungi anak terutama pelaku maka diskresi berusaha diterapkan oleh pihak kepolisian.

Pelaksanaan diskresi disarankan dilakukan sedini mungkin sehingga menghindarkan anak dari dampak negatif proses pidana formal yang ada. Pada bagan berikut dapat dilihat proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh UPPA Polres Kota Batu, dimana UPPA dalam menjalankan tugasnya tetap terus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban<sup>41</sup>:

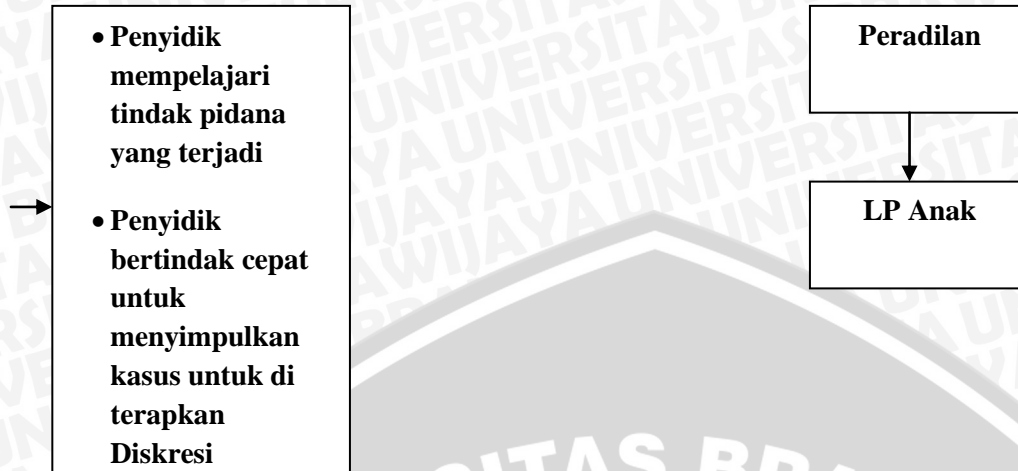
### **Bagan 5**

#### **Proses Pelaksanaan Diskresi**



<sup>40</sup> Wawancara dengan Briptu Eko Setyo, Anggota UPPA Polres Kota Batu, 25 November 2012

<sup>41</sup> Wawancara dengan Briptu Eko Setyo, Anggota UPPA Polres Kota Batu, 15 November 2012



(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2012)

Proses pemberlakuan diskresi mulai dilakukan oleh penyidik UPPA setelah memasuki tahap penyelidikan, dimana dalam tahap ini pihak kepolisian telah melakukan penyidikan terhadap kasus penganiayaan sehingga pihak kepolisian dapat menentukan dapat atau tidaknya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak diterapkan diskresi. Penentuan kebijakan ini dilakukan oleh penyidik dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada kesewenangan terhadap kekuasaan yang ada. Kepolisian sebagai pengayom masyarakat tetap memperhatikan hak asasi manusia baik korban maupun tersangka, sehingga keputusan diskresi tidak hanya sepihak saja.

Alasan pemberian diskresi tidak hanya bergantung pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh TR KABARESKRIM POLRI NO.POL. TR/1124/XI/2006 namun juga menitik beratkan pada keyakinan pihak kepolisian terhadap pelaku penganiayaan itu sendiri<sup>42</sup>. Diskresi dijalankan oleh pihak kepolisian berdasarkan situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan hati nuraninya sendiri.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani Kanit UPPA Polres Kota Batu, diolah, 21 November 2012

## **2. Pertimbangan-pertimbangan Pihak Kepolisian dalam Menerapkan Diskresi Dalam Kasus Penganiayaan Ringan**

Berdasar pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian maka terhadap kejahatan yang dapat diterapkan diversi sebagai salah satu upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan diskresi adalah penganiayaan, dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi syarat utama sebuah kasus dapat di diskresi oleh penyidik UPPA Polres Kota Batu adalah<sup>43</sup>:

1. Pelaku masih di bawah umur, ketentuan pelaku dibawah umur mengikuti pada Keputusan Mahkamah Agung yakni usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.

Kasus penganiayaan ringan yang terjadi pada tahun 2009 yang melibatkan AE (13 Tahun) dimana AE menganiaya WA (21 Tahun) tetangga satu kampungnya dengan menampar wajah WA. Kasus ini berahir dengan diskresi yang disetujui oleh korban melihat pelaku yang masih anak-anak. Berbeda dengan kasus yang terjadi pada 2010 dimana BI (24) melakukan penganiayaan terhadap KS (24) dikarenakan BI cemburu melihat KS bersama kekasihnya, kasus ini pada ahirnya dilanjutkan hingga tahap persidangan.

Pihak UPPA Polres Kota Batu mengutamakan kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku adalah kasus yang harus sesegera mungkin

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani Kanit UPPA Polres Kota Batu, diolah, 22 November 2012



diterapkan diskresi, dimana UPPA melihat usia anak sebagai salah satu faktor diterapkannya diskresi.

2. Kasus yang dapat di diskresi adalah kasus ringan, kasus yang dapat di diskresi adalah kasus ringan namun kasus berat tidak dapat di diskresi walau pelaku masih di bawah umur.

Pada kasus yang dialami TR (16 Tahun) dimana TR melakukan penganiayaan ringan yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada pelipis, kasus ini pada ahirnya di diskresi oleh pihak kepolisian. Pada kasus lain yang dilakukan oleh MZ (15 Tahun) dimana MZ melakukan pencurian sepeda motor kasus ini terus berlanjut hingga P21.

Pihak UPPA dalam memberikan diskresi terhadap kasus anak juga memperhatikan berat atau tidak tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Semakin ringan tindak pidana yang dilakukan anak maka semakin mendesak diterapkannya diskresi. Bila kasus yang dilakukan oleh anak adalah termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana ataupun pencurian diperberat maka pemberlakuan diskresi harus melihat faktor-faktor lain.

3. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, kerugian ini bila bersifat keadaan dan tidak berhubungan dengan tubuh dan nyawa seseorang maka lebih mendesak untuk di dahulukan.

Kasus yang terjadi pada tahun 2010 dimana BU (17 Tahun) melakukan pemukulan terhadap teman sekolahnya AP (16 Tahun) dikarenakan salah paham, berahir dengan jalan diskresi karena tindak pidana yang dilakukan oleh BU dianggap tidak membahayakan nyawa korban.

- repository.ub.ac
4. Keresahan masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan anak, tingkat keresahan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku juga diperhatikan oleh penyidik UPPA Polres Kota Batu.

Kasus pada tahun 2010 dimana dilakukan oleh BO (17 Tahun) yang melakukan pemukulan terhadap teman sekolahnya, kasus ini banyak mendapat perhatian dari lingkungan sekolah dimana pemukulan terjadi di lingkungan sekolah. Dikarenakan BO yang masih anak-anak kasus ini di diskresi oleh pihak kepolisian, dibantu dengan pihak sekolah untuk meyakinkan keluarga dan menjaga lingkungan sekolah kembali kondusif.

5. Persetujuan korban dan keluarga korban, persetujuan korban adalah hal utama dalam tercapainya diskresi dimana pihak kepolisian berperan aktif dalam mendapat persetujuan pihak keluarga korban.

Kasus yang terjadi pada tahun 2010 dimana BU (17 Tahun) melakukan pemukulan terhadap teman sekolahnya AP (16 Tahun) dikarenakan salah paham, kasus ini dapat di diskresi dikarenakan ada persetujuan dari keluarga korban untuk menerapkan diskresi terhadap pelaku. Berbeda dengan kasus yang dilakukan oleh IO (16 Tahun) yang melakukan penganiayaan terhadap anak tetangganya, kasus ini tidak di diskresi karena masih ada kendala pada keluarga korban yang menuntut kasus terus dilanjutkan.

Penganiayaan yang dilakukan oleh ZN (15 Tahun) dimana dia dengan sengaja menganiaya teman sekolahnya hingga mengalami luka memar, tidak dapat diselesaikan secara diskresi dikarenakan beberapa kendala salah satunya adalah tidak adanya persetujuan dari korban atas proses diskresi yang akan dijalankan. Persetujuan dari pihak keluarga menjadi salah satu syarat bagi

pihak kepolisian untuk menjalankan proses diskresi, hal ini berguna agar dikemudian hari tidak muncul penuntutan kembali<sup>44</sup>.

6. Kesiediaan pelaku dan keluarga pelaku, bila pelaku bersedia berdamai dan menepati permintaan pihak korban maka diskresi dapat segera di jalankan.

Keluarga pelaku selalu berharap proses hukum yang dihadapi oleh anaknya segera berahir, seperti kasus yang dialami oleh AN (17 Tahun) remaja putri yang menjambak rambut rekannya. Namun dalam pemberlakuan diskresi terdapat beberapa syarat yang harus ditepati dalam sebuah surat perjanjian yang ditanda tangani pelaku dan korban<sup>45</sup>.

Kasus yang dapat di diskresi adalah kasus yang dilakukan oleh anak-anak, yakni yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Anak yang melakukan penganiayaan dibawah usia 12 (dua belas) tahun dikenakan tindakan berupa dikembalikan pada orang tua, diserahkan pada dinas sosial, dan dipelihara oleh negara. Pemberlakuan tindakan pada anak adalah melihat pada kapan anak melakukan tindak pidana, tidak melihat pada kapan pelaku ditangkap.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Kota Batu rata-rata berusia 12 (dua belas) hingga 17 (tujuh belas) tahun dimana mereka masih berada di bangku sekolah<sup>46</sup>. Korban pemukulan anak-anak ini biasanya adalah teman sekolah atau teman bermain yang masih mereka kenal, dimana interaksi antara korban dan pelaku dapat memicu terjadinya penganiayaan tersebut<sup>47</sup>.Pelaku yang masih

<sup>44</sup> Wawancara dengan Briptu Eko Setyo, Anggota UPPA Polres Kota Batu, 21 November 2012

<sup>45</sup> Wawancara dengan Briptu Siti Nur Laila, Anggota UPPA Polres Kota Batu, 15 November 2012

<sup>46</sup> Wawancara dengan Briptu Eko Setyo, Anggota UPPA Polres Kota Batu, 15 November 2012

<sup>47</sup> Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani Kanit UPPA Polres Kota Batu, diolah, 21 November 2012



anak-anak membuat pihak UPPA menjadikan pilihan diskresi sebagai langkah awal, namun proses penyelidikan maupun penyidikan tetap berjalan.

Syarat kedua kasus yang dapat di diskresi oleh UPPA Polres Kota Batu adalah tindak pidana ringan, yang dimaksud tindak pidana ringan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00. Beberapa jenis tindak pidana ringan yakni penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, kerusakan ringan, penadahan ringan.

Dalam menjalankan diskresi terhadap kasus anak pihak kepolisian harus mendapat persetujuan dari pihak korban, untuk menetapkan diskresi terhadap kasus tersebut. Persetujuan dari korban dan keluarganya merupakan hal yang penting dalam tercapainya diskresi, sehingga pihak kepolisian bertugas menjembatani pertemuan pihak korban dan tersangka.

Dalam praktek di lapangan persetujuan dari pihak korban didapat setelah terdapat musyawarah antara pihak korban dan pelaku<sup>48</sup>. Pihak kepolisian tetap mengawasi dan memberikan masukan kepada pihak korban dan pihak pelaku agar musyawarah berjalan dengan baik sehingga tercapai kata sepakat<sup>49</sup>.

Peran serta pihak kepolisian, korban, pelaku, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam tercapainya diversifikasi yang baik bagi korban dan pelaku, dimana keputusan diversifikasi harus disetujui dan diketahui semua pihak<sup>50</sup>. Dalam proses diskresi korban bersedia

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Briptu Radityo Trinugroho, anggota UPPA Polres Kota Batu, 21 November 2012

<sup>49</sup> Wawancara dengan Briptu Eko Setyo, Anggota UPPA Polres Kota Batu, 15 November 2012

<sup>50</sup> Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani Kanit UPPA Polres Kota Batu, diolah, 21 November 2012

memberikan persetujuan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, syarat seperti ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan lagi melakukan perbuatan serupa terhadap korban<sup>51</sup>.

Dalam surat perjanjian yang ditandatangani diatas matrai tersebut disaksikan oleh pihak kepolisian beserta keluarga korban dan pelaku, dimana terdapat saksi Kepala Desa maupun Lurah setempat. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat pihak yang menolak dilakukannya diskresi, hal ini menghalangi terlaksananya kasus diskresi terhadap pelaku anak.

Bila terdapat pihak yang berusaha menghalangi pelaksanaan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik dari keluarga korban maupun masyarakat sekitar, pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat mencoba untuk memberikan pengertian terhadap pihak-pihak yang tidak menyetujui pelaksanaan diskresi. Pihak kepolisian dalam memberikan pemahaman kepada keluarga korban dapat dibantu oleh pihak lain yang dapat dipercaya oleh korban dan keluarganya.

Kasus anak yang terjadi dalam lingkup wilayah hukum Polres Kota Batu terdiri dari beberapa kasus konvensional yang dilakukan oleh anak yakni penganiayaan, pengeroyokan, pencurian, dan membawa lari wanita. Dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terdapat beberapa kasus yang di diskresi namun juga terdapat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak tetap dilanjutkan hingga tahap P21. Perbedaan kondisi yang terjadi pada anak tersebut berdasarkan pada pemenuhan syarat-syarat pemberlakuan diskresi atas kasus yang dilakukan oleh anak dan keyakinan penyidik UPPA Polres Kota Batu.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Briptu Radityo Trinugroho, anggota UPPA Polres Kota Batu, 15 November 2012

Berdasarkan data yang didapat di UPPA Polres Kota Batu terdapat beberapa kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak dan terjadi di wilayah hukum Polres Kota Batu pada tahun 2009 hingga tahun 2012, terdapat beberapa kasus yang di diskresi dan tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku oleh UPPA, yakni:

**Tabel 5**  
**Data Tindak Pidana Penganiayaan Ringan**

No.	Penganiayaan Pasal 352 KUHP 2009-2012	Status
1.	Tersangka berusia 16 Tahun melakukan penganiayaan terhadap korban yang berusia 36 Tahun dengan memukul korban di wajah	Diskresi
2.	Tersangka berusia 17 Tahun melakukan penganiayaan terhadap teman bermain hingga mengalami memar	Selesai P21
3.	Tersangka berusia 13 Tahun melakukan penganiayaan ringan terhadap korban seorang wanita berusia 21 Tahun	Diskresi
4.	Tersangka melakukan penganiayaan ringan terhadap teman bermain (usia korban dan tersangka tidak diketahui)	Diskresi
5.	3 orang anak-anak melakukan penganiayaan terhadap korban hingga mengalami luka ringan	Selesai P21
6.	Tersangka berusia 15 Tahun dengan sengaja menganiaya teman sekolahnya hingga mengalami lebam dan memar	Selesai P21
7.	Tersangka dan korban terlibat pertengkaran hingga tersangka emosi dan menjambak rambut korban (keduanya berusia 17 Tahun)	Diskresi
8.	Penganiayaan oleh anak berumur 16 Tahun	Selesai P21
9.	Seorang anak berusia 16 Tahun yang dibantu oleh seorang pria dewasa yang berusia 24 Tahun melakukan penganiayaan terhadap anak berusia 15 Tahun	Anak: Cabut Dewasa: P21
10.	Seorang anak yang berusia 16 Tahun melakukan pemukulan terhadap teman sekolahnya yang juga berusia 16 tahun	Tahap 1
11.	Anak berusia 17 Tahun melakukan pemukulan terhadap anak berusia 16 Tahun	Diskresi

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2012)

Berdasarkan data diatas tidak semua tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh pelaku anak diselesaikan menggunakan jalan diskresi. Terdapat beberapa kasus penganiayaan ringan yang tidak diterapkan diskresi oleh pihak kepolisian. Dari 11



(sebelas) kasus penganiayaan ringan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Batu terdapat 5 (lima) kasus yang di diskresi oleh pihak kepolisian.

Pada Tabel 5 angka 1 pelaku adalah anak yakni TR (16 Tahun ) merupakan tetangga korban yakni KJ (36 Tahun) dengan nomor laporan No. Pol: LP/80/VII/09/Res Batu, melakukan penganiayaan dengan alasan sering dimarahi dan dibentak oleh korban. TR yang sakit hati melampiaskan dengan memukul korban hingga mengalami memar di Pelipis. Pada ahirnya kasus ini di diskresi oleh pihak kepolisian, dimana pihak UPPA berpendapat bahwa TR adalah anak yang masih memiliki masa depan yang panjang. Syarat utama pemberlakuan diskresi telah dipenuhi dalam kasus ini yakni TR masih berusia anak-anak yakni 16 Tahun. Syarat kedua adalah tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan, tindak pidana yang dilakukan oleh TR adalah tindak pidana ringan dimana korban KJ mengalami luka memar dipelipis. Syarat ketiga adalah kerugian yang ditimbulkan oleh anak, dimana kerugian yang ditimbulkan oleh anak tidak berhubungan dengan nyawa atau ancaman yang serius.

Syarat utama selanjutnya adalah persetujuan korban yakni KJ dan keluarga KJ, dimana persetujuan diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan diskresi. Syarat selanjutnya adalah kesediaan pelaku dan keluarga pelaku untuk berdamai dan menepati persyaratan yang diajukan oleh pihak korban. Dengan terpenuhinya persyaratan utama diskresi maka diskresi terhadap kasus TR dapat dilakukan.

Pada tabel 5 angka 6 terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh AN 17 Tahun yang menganiayan rekannya dengan cara menarik rambut korban, dengan nomor laporan No.Pol: BP/III/2010/Satreskrim. Pada hari rabu tanggal 10 Maret 2010 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Raya Oro-oro Ombo Kota. Batu, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh AN terhadap AY. Tindak pidana penganiayaan terjadi dengan cara

tersangka AN pada waktu berada di dalam mobil menarik rambut korban AY hingga mengalami luka dan memar.

Kasus AN berahir dengan jalan diskresi dimana korban memberikan beberapa syarat pada tersangka, dengan menandatangani surat pernyataan. Syarat yang diajukan oleh korban berkisar pada ganti rugi berupa uang dan pernyataan korban tersangka untuk tidak lagi melakukan tindak pidana penganiayaan.

Perbedaan perlakuan ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat utama pelaksanaan diskresi, dimana dalam penerapan diskresi masih memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak UPPA. Sehingga terdapat kasus yang hampir serupa namun satu kasus tetap di lanjutkan hingga pengadilan dan kasus yang lain di diskresi.

Sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf L Undang-undang Kepolisian pihak kepolisian dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum atau profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut haruslah patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Berlandaskan Undang-undang kepolisian diatas UPPA Polres Kota Batu sangat berhati-hati dalam menerapkan aturan diskresi, sehingga penyidik UPPA harus benar-benar memeriksa setiap kasus dengan mendalam.

Pihak kepolisian kerap menemui pelaku penganiayaan yang tidak menyesali perbuatan yang dia lakukan, dimana pelaku terkesan bangga dengan perbuatan yang dia lakukan<sup>52</sup>. Dalam pemeriksaan oleh penyidik tersangka yang tidak merasa menyesali

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Briptu Eko Setyo, Anggota UPPA Polres Kota Batu, 15 November 2012

perbuatannya sering bertindak agresif, sehingga kemungkinan untuk pelaku tersebut kembali melakukan tindakan yang sama sangat besar.

Pelaku anak yang tidak mau bekerjasama dengan pihak kepolisian kerap menghambat proses pemeriksaan yang dijalankan oleh UPPA. Dalam beberapa kasus yang terjadi anak yang melakukan tindak pidana kerap tidak terbuka terhadap pemeriksaan yang dijalankan oleh penyidik. Terdapat beberapa alasan pelaku anak tidak bekerjasama dengan baik yakni rasa takut yang berlebih pada pihak kepolisian dan depresi atas peristiwa yang terjadi.

Penilaian pihak kepolisian dalam menerapkan diskresi terhadap kasus anak akan berbeda bila anak tersebut pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya. Pengulangan tindak pidana oleh anak memberi penilaian berbeda terhadap urgensi penerapan diskresi terhadap kasus anak<sup>53</sup>. Hal ini mempengaruhi penilaian dan pandangan pihak kepolisian terhadap proses hukum pidana kedepannya, tidak jarang pihak kepolisian lebih memilih meneruskan perkara hingga perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani Kanit UPPA Polres Kota Batu, diolah, 21 November 2012



### **C. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Diskresi Terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak**

UPPA dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan ringan selalu mengedepankan proses diskresi, dimana proses diskresi diterapkan dengan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan TR dan berdasar keyakinan penyidik UPPA. Dalam proses penerapan diskresi tidak selalu dapat berjalan dengan baik, masih ditemui kendala yang menghambat kinerja penyidik UPPA Polres Kota Batu. Adapun beberapa kendala yang menghambat penerapan diskresi untuk kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut:

1. Anggapan negatif masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian, dimana bila penyidik hendak menerapkan diskresi terhadap suatu kasus terdapat pihak-pihak yang menganggap bahwa diskresi hanya jalan pihak kepolisian untuk mendapat imbalan dengan tidak memproses kasus.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada, dimana masyarakat masih banyak yang tidak memahami konsep diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Pihak keluarga korban yang tidak menyetujui diterapkannya diskresi, dimana keluarga korban selalu meminta pihak kepolisian untuk memenjarakan atau menghukum anak pelaku penganiayaan dan tidak menyetujui diskresi sebagai upaya terbaik bagi anak baik pelaku maupun korban.

Diskresi dalam penerapan dan pelaksanaannya masih memiliki hambatan. Untuk mengatasi hambatan yang muncul pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya agar diskresi dapat dilaksanakan, diantaranya:

1. Pihak kepolisian saat ini terus membangun citra positif agar pandangan negatif masyarakat terhadap kepolisian dapat dihindari. Selama ini dalam pandangan masyarakat kepolisian erat kaitannya dengan suap dan nepotisme, sehingga pihak kepolisian saat ini membangun citra sebagai pengayom masyarakat. Pihak kepolisian mulai membangun citra dengan melakukan pelayanan masyarakat dengan baik dan ramah dan melakukan patroli rutin dipemukiman warga.
2. Untuk mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan diskresi yang berlaku, pihak kepolisian melakukan penyuluhan pada masyarakat luas tentang peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan masyarakat mengerti dan paham akan peraturan hukum yang berlaku. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini masih terbatas pada seminar, pemasangan banner atau pamflet di daerah strategis, dan pemberian informasi melalui majalah dinding warga.
3. Keluarga korban yang tidak setuju untuk diterapkan diskresi harus diberi pemahaman, pihak penyidik UPPA selalu memberi pemahaman terhadap korban atau keluarga atas tindakan yang diterapkan. Pihak kepolisian dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Kepala Desa, Kepala Sekolah, ataupun tokoh masyarakat lain.

Pada tabel berikut ini dapat dibandingkan antara kendala yang dihadapi oleh UPPA dan upaya yang telah dilakukan oleh UPPA:

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diangkat dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pertimbangan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Batu dalam menerapkan diskresi dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, antara lain:
  - a. Pelaku masih di bawah umur, yakni pelaku anak yang telah berumur 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Tindak Pidana yang dilakukan tergolong sebagai tindak pidana ringan;
  - c. Kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana kerugian yang timbul tidak membahayakan nyawa korban.;
  - d. Keresahan yang timbul dimasyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;



- e. Persetujuan dari korban dan keluarganya atas proses diskresi yang diterapkan oleh pihak Kepolisian;
  - f. Kesiediaan pelaku dan keluarga pelaku untuk menepati perjanjian atau syarat diskresi, dengan pengawasan dari pihak kepolisian.
  - g. Diskresi diterapkan secara situasional, yakni pihak kepolisian melihat pada situasi dan kondisi para pelaku, korban, maupun masyarakat yang memungkinkan diterapkan diskresi
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Batu dalam menjalankan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, antara lain:
- a. Anggapan negatif masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian bila menerapkan diskresi;
  - b. Pihak keluarga korban yang menolak kasus untuk di diskresi.
3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan diskresi terhadap kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak, antara lain:

a. Pihak Polres Kota Batu saat ini terus membangun citra positif sebagai pengayom masyarakat. Pihak kepolisian mulai membangun citra dengan melakukan pelayanan masyarakat dengan baik dan ramah.

b. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberi pemahaman terhadap korban dan keluarga korban atas tindakan diskresi yang diterapkan, agar tercipta pengertian atas diskresi dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan keadilan untuk korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan terwujud kepercayaan terhadap kinerja kepolisian yang mengemban tugas penyelidikan dan penyidikan oleh pihak-pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat.
- b. Dikarenakan begitu kompleksnya hukum positif Indonesia yang berlaku, sebaiknya pihak kepolisian bekerjasama dengan kementerian dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat luas akan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Diskresi adalah sebuah kebijakan yang masih asing dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, dimana diperlukan

sebuah pengenalan pada masyarakat atas diskresi sebagai sebuah metoda hukum alternatif.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.
- Bryan A. Garner , *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul MN, 1999.
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartono, kartini, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, sinar grafika, jakarta, 2010.
- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, 1999.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, 2010.
- P.A.F. Lamintang, Theo, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- R, Soesilo, *UU Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polieta, Bogor.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum Cetakan III*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, refika aditama, Bandung, 2005.

## UNDANG-UNDANG

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

